Vol.V **Juni-Juli 2012** Edisi **78**

BaKTI News

www.bakti.org

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

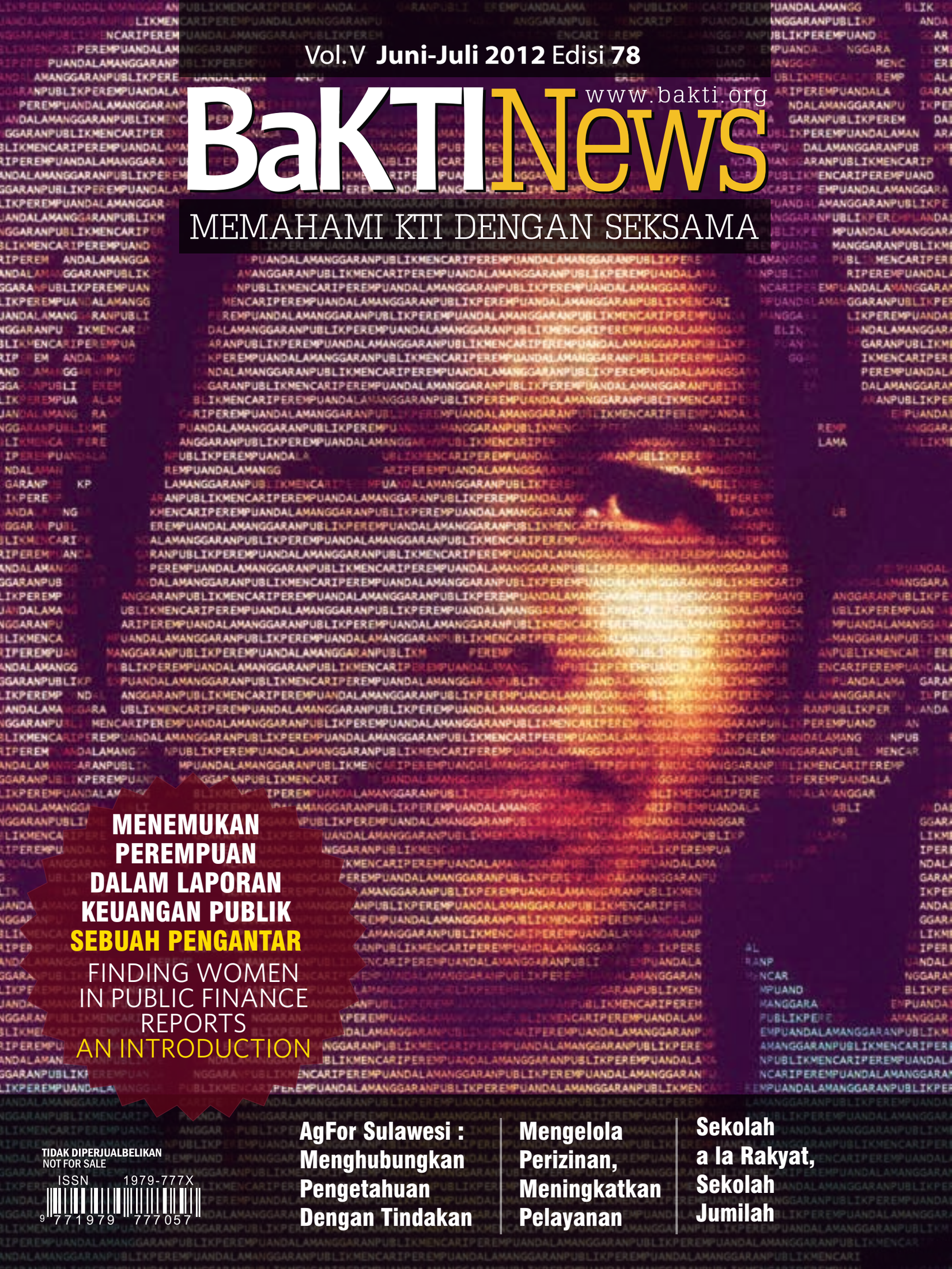

MENEMUKAN PEREMPUAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PUBLIK SEBUAH PENGANTAR

FINDING WOMEN IN PUBLIC FINANCE REPORTS AN INTRODUCTION

AgFor Sulawesi : Menghubungkan Pengetahuan Dengan Tindakan

Mengelola Perizinan, Meningkatkan Pelayanan

Sekolah a la Rakyat, Sekolah Jumilah

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.org dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia [BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakri.org and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BaKTINews www.bakti.org
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

Editor
MILA SHWAIKO
VICTORIA NGANTUNG
Forum KTI
ZUSANNA GOSAL
ITA MASITA IBNU
Events at BaKTI
SHERLY HEUMASSE
Website of the Month
STEVENT FEBRIANDY
Smart Practices & NGO Profile
AFDHALIYANNA MA'RIFAH
Website
AKRAM ZAKARIA
Info Book
SUMARNI ARIANTO
Design Visual & Layout
ICHSAN DJUNAID

Pertanyaan dan Tanggapan

Redaksi
Jl. H.A. Mappanyukki No. 32
Makassar 90125
Sulawesi Selatan - Indonesia
T. **+62 411 832228, 833383** F. **+62 411 852146**
E. **info@bakti.org**

www.bakti.org www.batukar.info

SMS BaKTINews 085255776165
E-mail: baktinews@bakti.org
Anda juga bisa menjadi penggemar BaKTINews di Facebook : www.facebook.com/yayasanbakti

DAFTAR ISI | CONTENTS

3 **Menemukan Perempuan Dalam Laporan Keuangan Publik Sebuah Pengantar**
Finding Women in Public Finance Reports An Introduction

6 **Berlakukan Segera Permendag 30 Tahun 2012 Untuk Kedaulatan Pangan Indonesia**

9 **AgFor Sulawesi : Menghubungkan Pengetahuan Dengan Tindakan**

10 **Menganalisa Tidak Hanya Pengeluaran Tapi Juga Penerimaan Publik Memperkenalkan PERA Program Expenditure and Revenue Analysis**

11 **Mengelola Perizinan, Meningkatkan Pelayanan**

13 **Sekolah a la Rakyat, Sekolah Jumilah**

15 **Kopernik ke Papua: Memperkenalkan Teknologi Tepat Guna**

17 **Desa Berdata, Rakyat Berdaya**

18 **Membangun Pengetahuan Publik**

20 **Pelatihan Barefoot Engineers di Papua**
Barefoot Engineers Training in Papua

21 **Memahami Realitas Kemiskinan di Sulawesi Barat**

23 **Menunggu Kisah Ikan Purba**

24 **Tobelo, Tobelo, Tobelo**

26 **Peluang**

26 **Website Bulan ini**

27 **Wajah KTI**
Pasar Sosial di Tambaruni, Fak Fak

29 **Profil LSM**
Yayasan Keluarga Sehat Sejahtera Indonesia (YKSSI)

30 **Kegiatan di BaKTI**

31 **Info Books**

Berkontribusi untuk BaKTINews

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000-1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style. Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

Menjadi Pelanggan BaKTINews
Subscribing to BaKTINews

Untuk berlangganan BaKTINews, silakan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.org atau SMS 085255776165. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.org or SMS to 085255776165.
For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINews diterbitkan oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan Pemerintah Australia.
BaKTINews is published by The BaKTI Foundation with support of the Government of Australia.

Pandangan yang dikemukakan tak sepenuhnya mencerminkan pandangan Yayasan BaKTI maupun Pemerintah Australia.

The views expressed do not necessarily reflect the views of Yayasan BaKTI and the Government of Australia.

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR DECENTRALISATION (AIPD) | Australian AID

OLEH **CHANDRA SUGARDA**

Itu adalah beberapa pertanyaan yang muncul, ketika topik gender dibicarakan dalam berbagai workshop dan pertemuan persiapan penulisan Public Expenditure Analysis atau Analisa Keuangan Publik (PEA). Topik gender, memang merupakan hal yang baru bagi sebagian orang, apalagi bila dihubungkan dengan pengelolaan keuangan publik.

Padahal pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang di antaranya adalah mewajibkan kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Inpres ini kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan, mulai dari UU no. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, Peraturan Menteri Keuangan No. 104/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011, hingga Nota Keuangan dan APBN 2011. Namun kenyataannya, konsep gender dan tata laksana pengelolaan anggaran yang responsif gender masih asing di telinga banyak orang, termasuk mereka yang memiliki wewenang untuk membuat perencanaan dan penganggaran belanja publik.

Mendengar kata 'gender', orang biasanya akan berasumsi 'perempuan'. Padahal ada laki-laki dan perempuan dalam makna

Those are a few of the questions that were asked when the topic of gender was discussed in workshops and meeting leading up to the Public Expenditure Analysis (PEA). Gender is a new topic for many people, especially those involved in public finance.

This is the despite the fact that the government issued Presidential Instruction No. 9 2000 regarding Gender Mainstreaming in National Development, which makes it compulsory for ministries and institutions to integrate women and men's experiences, aspirations, needs, issues in development, monitoring and evaluation of all development policies, programs, and activities. The Presidential Instruction, or Inpres, was strengthened by a number of regulations, beginning with Law No. 17/2007 regarding RPJPN 2005-2025, Ministry of Finance Regulation No. 104/2010 regarding Instruction for Preparation and Review of State Ministry / Agency Work Plan and Budget for Fiscal Year 2011, Finance Notes and APBN 2011. However, in reality the concept of gender and gender-responsive finance management is still foreign to many ears, including the ears of those who have the authority to plan and budget for public spending.

Hearing the word 'gender', most people assume 'women'. The word gender actually means both men and women. Gender empowerment programs are programs that help all citizens, men and women, who experience injustice in accessing regional government facilities or programs.

MENEMUKAN PEREMPUAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PUBLIK

Sebuah Pengantar

Finding Women in Public Finance Reports

An Introduction

"Perempuan kan kodratnya mengurus rumah tangga..."
"Mengapa hanya nasib perempuan yang diperjuangkan? Bagaimana dengan laki-laki?"
"Mengapa kita bicara gender dalam diskusi mengenai keuangan publik?"

"It's in women's natures to look after the house..."
"Why is it only a fight for women's fates? What about men?"
"Why are we talking about gender in a discussion about public finance?"

kata gender. Program pemberdayaan gender merupakan program yang membantu semua warga, laki-laki dan perempuan, yang mengalami ketidakadilan dalam menikmati fasilitas atau program dari pemerintah daerah. Tak dapat dipungkiri, penggunaan kata "Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" atau PP&PA oleh pemerintah juga turut andil dalam membentuk persepsi kita mengenai gender. Padahal urusan PP&PA selain mengatur pemerataan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, juga mengurus para penyandang cacat (people with disabilities) dan unit keluarga.

Gender pun bukan merupakan sarana pembangkangan perempuan dari kodrat atau peran sosialnya. Pemberdayaan gender semestinya dipahami sebagai upaya bersama untuk menciptakan akses, kesempatan dan manfaat pembangunan yang bisa dirasakan oleh perempuan dan laki-laki dalam suatu wilayah.

Berbicara soal belanja daerah, kita bicara bagaimana anggaran yang dibelanjakan bisa dirasakan manfaatnya, baik oleh warga laki-laki maupun warga perempuan. Hal ini dapat tercermin dari program-program yang direncanakan dan realisasi pelaksanaan program tersebut dalam tahun berjalan.

Berdasarkan data, belanja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata 0.1 persen/tahun (2007-2010), sementara di Sulawesi Tenggara rata-rata 0.3 persen/tahun (2007-2011). Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan belanja untuk urusan lain. Selain masih kecilnya alokasi belanja daerah untuk PP&PA, konsistensi keberadaan program

It can't be denied that the use of the phrase "Women's Empowerment and Child Protection" by the government contributes to forming our perceptions of gender. The Women's Empowerment and Child Protection department, aside from regulating protection for women and children, also focuses on people with disabilities and family units.

Gender is not a form of female defiance of the natural order or social roles. Gender empowerment must be understood as a joint effort to realize access, opportunities, and benefits of development for men and women in a region.

In terms of regional spending, we talk in terms of how budgets can have an impact, both for male and female citizens. This can be reflected in planning for programs and program implementation in that year.

Based on data, spending on Women's Empowerment and Child Protection in South Sulawesi is around 0.1 % a year (2007-2010); in Southeast Sulawesi it is on average 0.3 % per year (2007-2011). This amount is still very low compared to spending on other sectors. Not only in the allocation in regional spending for Women's Empowerment and Child Protection very low, but consistency in program implementation is also varied. Some programs appear every year, some 2-3 times every 5 years and other only once every 5 years.

Gender responsive budgeting and expenditure is just part of Women's Empowerment and Child Protection, but

pun masih bervariasi. Ada program yang muncul setiap tahun, ada yang muncul 2-3 kali dalam 5 tahun, bahkan ada juga program yang muncul hanya satu kali dalam 5 tahun.

Belanja atau anggaran yang responsif gender semestinya tidak hanya berada dalam urusan PP&PA, tetapi juga wajib dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran untuk urusan/sektor lain, terutama sektor-sektor yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Sektor seperti pendidikan, kesehatan, pengembangan infrastruktur dasar bagi warga dalam sebuah Provinsi atau Kabupaten/Kota, haruslah mempertimbangkan jumlah warga laki-laki dan perempuan, termasuk anak-anak yang berada di wilayah itu. Demikian juga penciptaan lapangan kerja, perlu memperhatikan jumlah laki-laki dan perempuan angkatan kerja yang tersedia. Dengan mempertimbangkan jumlah warga laki-laki dan perempuan dalam perencanaan anggaran, atau dengan kata lain menggunakan data terpilah dan data gender, maka distribusi anggaran yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan warga laki-laki dan perempuan dapat dilakukan secara merata.

Data terpilah menurut jenis kelamin dapat memberi gambaran tentang posisi, kondisi dan kebutuhan kelompok perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Pemetaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan ini penting dalam perumusan perencanaan program dan fokus kegiatan, sehingga akan mudah untuk menentukan intervensi yang tepat di masing-masing bidang.

Misalnya dari 2,2 juta penduduk Sulawesi Tenggara pada tahun 2009, sebanyak 95% warga laki-lakinya melek huruf, sementara perempuan hanya 85%. Namun bila dilihat dari Angka Partisipasi Murni tingkat SMP/SMA, APM perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Dengan adanya informasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah perempuan buta huruf di wilayah Sulawesi Tenggara berasal dari penduduk usia dewasa, bukan usia sekolah. Artinya, pemerintah perlu membuat program baca/tulis khusus bagi perempuan dewasa, untuk meningkatkan angka melek huruf perempuan di wilayah ini. Sementara itu, pada usia sekolah, dimana APM perempuan tingkat SMP/SMA lebih tinggi dari laki-laki, pemerintah perlu menciptakan program yang mendorong peningkatan partisipasi anak laki-laki dalam sistem pendidikan.

Membuat anggaran responsif gender memang bukan hal mudah, terlebih karena ketersediaan data terpilah yang menjadi dasar dalam proses perencanaan, yang masih sangat rendah. Namun hal ini bukan berarti mustahil. Pengumpulan data terpilah secara lengkap bisa menjadi awal dari proses pembuatan anggaran responsif gender. Dengan kelengkapan data inilah, proses pertimbangan kebutuhan anggaran demi pemerataan hasil pembangunan bisa dilakukan.

Dalam laporan PEA atau Analisa Keuangan Publik beberapa Provinsi terakhir, upaya pengarusutamaan gender sudah terlihat dalam semua bab, dimana sudah mulai dibiasakan untuk berpikir bahwa ada laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah, dan bukannya men-generalisir semua ke dalam satu data. Hal ini terlihat dalam penggunaan data terpilah dalam data demografi (populasi, angka kemiskinan, pengangguran, dan angkatan kerja), data kesehatan, pendidikan, infrastruktur (akses perempuan terhadap listrik, air bersih dan sanitasi), serta hubungan belanja dengan gender.

Pengarusutamaan gender dan pengumpulan data terpilah merupakan langkah awal yang perlu dilakukan, untuk mempermudah proses menuju pembuatan anggaran yang resposif gender. Dengan penganggaran yang resposif gender ini, diharapkan laki-laki dan perempuan memiliki akses, manfaat dan kontrol yang sama terhadap sumberdaya pembangunan, seperti pendidikan, ketrampilan, informasi dan kredit. Selain itu, laki-laki dan perempuan juga akan memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik yang terkait dengan kebutuhan fasilitas sehari-hari atau infrastruktur, terbukanya lapangan kerja, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sehingga nantinya, seorang anak perempuan yang berasal dari keluarga miskin yang tinggal di sebuah pedalaman, bisa mengenyam pendidikan yang sama dengan saudara laki-lakinya, bisa membantu orangtua melakukan pekerjaan rumah, seperti mengumpulkan air bersih dari sumber yang dekat dari tempat tinggalnya, dan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan saat lulus sekolah.

should also be taken into account in budget planning for other sectors, especially those related to public services. Sectors such as health, education, and basic infrastructure in provinces or districts/municipalities, must take into account the number of women, men and children in that region. This should also be the case in creating job opportunities. By taking into account the number of men and women in budget planning, or in other words by using disaggregated data and gender data, so that the distribution of funds needs to improve the welfare of men and women is even.

Disaggregated data by sex can provide a description of position, condition, and needs of men and women in different development areas, and also of what issues are faced in efforts to reduce imbalance. Needs mapping for men and women is also important in creating program plans and activity focus, and will also make it easier to determine the right interventions in various fields.

For example, of 2.2 million Southeast Sulawesi inhabitants in 2009, as many as 95% of men were literate, but only 85% of women were. However, from the Real Participation rates for junior high school and high school, the rate for women is higher than that of the men. With that information, it can be concluded that illiteracy in women in Southeast Sulawesi is predominant in adult women, not school-aged women. Therefore, the government needs to create literacy programs for adult women to improve literacy figures in the region. In addition, for school aged people, where the Participation Rate for women is higher than men, the government should create a program that focuses on improving participation for boys in the education system.

Creating a gender- responsive budget is not easy, especially because the availability of disaggregated data (a basic component of the planning process) is very low. But this doesn't mean it's impossible. The collection of disaggregated data should be part of the process of creating a gender-responsive budget. By ensuring this data is complete, the process of analyzing budget needs for more even development can be achieved.

In the Public Expenditure Analysis (PEA) reports from a number of provinces, efforts to mainstream gender can be seen in all chapters, with the realization that there are men and women in each region and that they can't be represented through one set of data. This can be seen through disaggregated demographic data (population, poverty rates, unemployment, and labor force), health data, education data, infrastructure data (women's access to electricity, clean water, and sanitation), and expenditure related to gender.

Gender mainstreaming and collection of disaggregated data is the first step that must be taken to facilitate the process of creating a gender-responsive budget, so that men and women have the same access, benefits, and control of development resources, like education, skills, information and credit. Women and men should also have the same opportunities to participate in the development process, from those associated with daily facility needs or infrastructure, open jobs, and participation in decision making. Hopefully, one day girls from poor families in isolated areas will receive the same education as their male peers, help their parents with housework such as water collection from a water source near their hous, and have the same opportunities to get a job after they graduate.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Gender Specialist pada Program PEACH (Public Expenditure Analysis and Capacity Enhancement) World Bank dan dapat dihubungi melalui email **chandra.sugarda@gmail.com**

KEDAULATAN PANGAN

Berlakukan Segera Permendag 30 Tahun 2012 Untuk Kedaulatan Pangan Indonesia

OLEH **SAID ABDULLAH**

Penundaan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 tahun 2012 tentang ketentuan impor produk hortikultura hingga dua kali merupakan bentuk kekalahan pemerintah atas pengusaha dalam upaya melindungi petani dan produk hortikultura dalam negeri. Pemerintah kompromistis terhadap kepentingan pengusaha dengan alasan ketidaksiapan teknis. Padahal peluang untuk siap seluruhnya akan sangat mungkin lama terjadi.

Menurut Ayip Abdullah, officer advokasi dan jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), perlindungan terhadap petani dan produk pertanian mendesak segera dilakukan. Tidak ada alasan untuk terus menunda-nunda pelaksanaannya. Petani dan produk hortikutura dalam negeri terus terdesak produk impor. Akibatnya petani lebih sering menanggung kerugian dari pada untung. Derasnya impor yang masuk menunjukkan lemahnya kedaulatan pangan Indonesia. Padahal semestinya kita mampu berdaulat menjadi tuan di negeri sendiri.

Semestinya tidak ada lagi kata penundaan atas semua upaya proteksi terhadap petani dan produk dalam negeri. Hal ini penting karena neraca perdagangan (rasio ekspor-impor) Indonesia sudah menunjukan defisit Rp. 642 juta dollas AS pada tahun ini. Didalamnya impor produk hortikultura memberikan sumbangan yang cukup signifikan.

Impor produk buah dan sayuran terus meninggi. Total volume impor mencapai 1,6 juta ton pada tahun 2010, naik 500 ribu ton dari sebelumnya 1,1 juta ton pada tahun 2010. Hal ini sangat jomplang jika dibandingkan dengan volume impor pada tahun yang sama. Pada tahun 2010, total impor hanya 407,2 ribu ton kemudian turun drastis pada tahun 2011 menjadi hanya 63 ribu ton.

Adapun nilainya, pada tahun 2011 menembus Rp. 15,3 triliun. Angka ini naik dari Rp. 5,4 triliun pada tahun 2006. Jika dirata-ratakan setiap tahun terjadi kenaikan nilai impor sebesar Rp. 1 triliun per tahun. Angka-angka tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa situasi petani dan produk hortikultura (sayur dan buah) indonesia benar-benar terancam, terang Ayip Abdullah.

Menurut Ayip Abdullah, sepanjang musim petani dan produknya berada dalam situasi sulit. Setiap musim panen raya produk hortikultura tiba, produk impor masuk bahkan hingga ke sentra-sentra produksi. Tentu masih segar dalam ingatan kita, periode September–Oktober tahun lalu, ketika ribuan ton kentang impor masuk hingga ke Dieng dan Lembang, sentra kentang di Indonesia. Akibatnya harga ditingkat petani terjun bebas. Belum lagi kasus masuknya bawang merah pada awal tahun ini yang pada saat bersamaan petani di Berebes dan Tegal sedang panen raya.

Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan ini semestinya memberikan harapan akan adanya proteksi pada petani dan produknya. Selain itu dengan peraturan ini kepentingan konsumen juga dapat dilindungi. Dengan demikian, Pemerintah semestinya tidak boleh lagi ragu menegakkan aturan demi menyejahterakan petani yang notabene adalah penduduk terbesar di negeri ini. Sebanyak 25,4 juta keluarga menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Saatnya pemerintah "menang" atas tekanan sekelompok "kecil" pihak yang ingin mendapatkan keuntungan berlipat. Jika tidak ingin negeri ini tenggelam oleh produk hortikultura impor.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Sindangbarang Grande No 16, Sindangbarang, Bogor
Telp/fax. 0251 8423752, 0813 82 151413
Email: **admin@kedaulatanpangan.net,**
ayip@kedaulatanpangan.net
Website: **www.kedaulatanpangan.net**

MENGHUBUNGKAN P

OLEH **ENGGAR PARAMITA**

Sulawesi, sebuah pulau di Indonesia yang kaya akan berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang unik. Sama seperti wilayah lainnya, perkembangan ekonomi di sebagian besar Sulawesi ditandai dengan beralihnya fungsi hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Pengalihan fungsi hutan mengakibatkan erosi tanah dan sedimentasi di sungai dan danau lebih sering terjadi sehingga menyebabkan tanah menjadi rusak. Lapisan tanah yang subur terbawa oleh air sehingga mengurangi produktivitas dan kualitas lahan. Efek selanjutnya, kikisan tanah akan terbawa ke laut oleh aliran sungai, lalu menutupi permukaan air. Terhalangnya air oleh lapisan tanah akan mengurangi oksigen dan cahaya untuk ikan dan tumbuhan laut lainnya. Sehingga dampak yang dialami adalah berkurangnya populasi ikan, menurunnya pasokan bahan makanan dan pendapatan masyarakat, serta kerusakan kekayaan terumbu karang yang unik di Sulawesi.

Isu lingkungan hidup seperti ini tidak hanya terjadi dengan sendirinya, namun berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi oleh petani Sulawesi.

Permasalahan pertama yaitu ketergantungan petani terhadap satu jenis tanaman komoditas yang seringkali bukan asli daerah tersebut, seperti kopi dan cokelat. Akibatnya, pendapatan petani berfluktuasi sesuai dengan harga komoditas di pasaran dunia. Juga, ketika petani hanya menanam sedikit jenis tanaman, maka lahan mereka beresiko lebih tinggi untuk mengalami hama dan penyakit. Selain itu, lahan yang didominasi oleh satu komoditas dan tidak ditangani dengan baik akan sering mengalami masalah seperti erosi, sedimentasi, longsor, dan banjir.

Kedua, analisa dari para ilmuwan memprediksi bahwa di masa depan, iklim Sulawesi akan mengalami perubahan besar, sehingga petani perlu beradaptasi untuk menjamin pendapatan mereka, memastikan ketersediaan bahan makanan dan menjamin agar lingkungan tetap terjaga.

Ketiga, masalah hukum dan keadilan. Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan lahan yang mereka gunakan. Kondisi seperti inilah yang seringkali berujung pada konflik. Ditambah lagi dengan kondisi bahwa sebagian besar masyarakat tidak memiliki status hukum terhadap lahan yang mereka kelola. Hak perempuan pun seringkali dilupakan, padahal perempuan banyak bekerja di lahan dan mengelola sumber daya alam, serta berperan besar mengurus rumah tangga dan keluarga.

Proyek 'Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: Menghubungkan Pengetahuan dengan Tindakan' (selanjutnya disebut AgFor Sulawesi) dirancang untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani di atas. Proyek ini akan bekerja sama dengan masyarakat lokal, pemerintah, serta lembaga swadaya masyarakat guna mengembangkan cara-cara untuk menciptakan dan melakukan metode pengelolaan lahan yang ramah lingkungan.

Sulawesi, the island in Indonesia that has a large number of animals and plans that are found nowhere else on the planet. The economic development of large parts of Sulawesi, as elsewhere in South East Asia, has been characterised by conversion of natural forests and a rapid loss of biodiversity.

This 'conversion' of forests usually results in the land becoming degraded, with more soil erosion and sediment in rivers and lakes, which reduces the productivity of the land because the good soil is washed away. Furthermore, the rivers carry the soil to the sea, which clouds the water and reduces the amount of oxygen and light for fish and aquatic plants. This, in turn, reduces fish populations, which means that food supplies and incomes decrease, and it also helps destroy the unique, species-rich, coral reefs surrounding Sulawesi.

These environmental problems don't just happen by themselves. They are linked to other issues in society.

The first big issue is that farmers in Sulawesi mostly rely on a limited number of crop species, which are often of exotic origin such as cacao or coffee. As a result, their incomes fluctuate along with changes in world markets. Also, when farmers grow only a few types of crops, their farms face an increased risk from pests and diseases. Moreover, without a range of plants on their farms and good management, there are often problems such as soil erosion, sedimentation, landslides and floods.

Second, scientists have studied Sulawesi's climate and predict that the island will experience big changes in climate in the near future. Farmers need to learn ways of adapting to the changes so that their incomes are secure, food supply is ensured and the environment is protected.

Third, there are some legal and equity problems. Communities are not yet fully involved in planning and managing how the land in their areas is used, which can lead to conflict. Another part is many people don't have legal title to the land they use. As well, women's rights may often be ignored despite the fact that women do much of the farm and natural resource management beside maintaining the household and family.

The 'Agroforestry and Forestry in Sulawesi: Linking Knowledge with Action' (AgFor Sulawesi) project has been designed to help address these problems. The project will work with local communities, governments and non-government organizations to design ways of creating and managing environmentally friendly land management methods.

In particular, the main goal of AgFor Sulawesi is improved, fairer, and more sustainable livelihoods from agroforests and forests for rural communities in Sulawesi.

Agroforestry is a dynamic, ecologically based, natural resources management system that, through the integration of trees on farms and in the agricultural landscape, diversifies and sustains production for increased social, economic and environmental benefits for land users at all levels (ICRAF, 2006).

Valuable environmental services provided by agroforestry include soil fertility replenishment, water catchment protection, carbon sequestration, biodiversity conservation and landscape restoration (Garrity, 2004) . Furthermore, agroforestry systems can be defined as land-use systems in which woody perennials are deliberately integrated with agricultural crops, animals or both, in

Sulawesi

PENGETAHUAN DENGAN TINDAKAN

Secara khusus, AgFor Sulawesi bertujuan untuk meningkatkan matapencaharian yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan bersumber dari agroforestri dan kehutanan, melalui sistem agroforestri yang dinamis bagi masyarakat pedesaan di Sulawesi.

Yang dimaksud dengan agroforestri adalah sistem pengelolaan sumber daya alam yang dinamis dan berbasis ekologi, yang melalui penggabungan tanaman di suatu lahan pertanian, menghasilkan keberagaman dan mendukung hasil produksi, guna meningkatkan manfaat sosial, ekonomi, serta lingkungan kepada berbagai tingkatan pengguna lahan (ICRAF, 2006).

Agroforestri akan menyediakan jasa lingkungan yang berharga seperti perbaikan kesuburan tanah, perlindungan terhadap resapan air, penyimpanan karbon, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pemulihan tanah (Garrity, 2004). Lebih lanjutnya, sistem agroforestri dapat didefinisikan sebagai sistem penggunaan lahan di mana pohon secara sengaja disatukan penanamannya dengan tanaman pertanian, hewan ternak atau bahkan keduanya, di sebuah pengelolaan tata ruang atau dalam suatu rangkaian waktu (Huxley and van Houten, 1997).

Untuk mencapai tujuan utamanya, AgFor Sulawesi berfokus pada tiga komponen yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Komponen tersebut adalah matapencaharian, tata kelola, dan lingkungan.

Komponen matapencaharian meliputi peningkatan dan penggunaan yang adil dan berkelanjutan dari hasil agroforestri dan kehutanan oleh laki-laki dan perempuan yang kurang mampu. Komponen tata kelola terdiri dari peningkatan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam tata kelola penggunaan lahan dan sumber daya alam di tingkat kabupaten dan kecamatan. Sedangkan komponen lingkungan berupa peningkatan ekosistem dan bentang lahan secara nyata, serta pengelolaan yang terintegrasi.

some form of spatial arrangement or temporal sequence (Huxley and van Houten, 1997).

In order to accomplish the main goal, AgFor Sulawesi focuses on three main components that all link together: livelihoods, governance, and environment.

The livelihood component consists of improved, fair, and sustainable use of agroforestry and forestry products by poor and underprivileged women and men. Governance is based on increased involvement of women and men in participatory governance of the use of land and natural resources at sub-district and district levels. While the environment component equals with a greater number of landscapes and ecosystems have improved, integrated management.

AgFor Sulawesi will study what farmers do, how they live and what they want. The project will train farmers to develop and operate tree nurseries; plant and manage tree gardens; better understand and make links to markets; produce better quality products for which they will receive higher prices; involve women in making decisions; and improve management of landscapes.

At the same time, AgFor Sulawesi will work closely with local government agencies to help find ways to achieve more prosperity, fairness and harmoniously managed lives and landscapes.

Research results on technical issues to do with plants, livelihoods, and landscapes will also be provided, as well as supporting the governments to analyse their policies and plans, specifically about land tenure policies and procedures.

Farmers, particularly women and underprivileged groups, non-government organizations, markets and traders associations, government agencies at all levels are the main beneficiaries of AgFor Sulawesi project.

It has started in the provinces of South Sulawesi, South East

Petani dan tim AgFor di Konawe, Sulawesi Tenggara
Farmers and AgFor team in Konawe, South East Sulawesi

AgFor Sulawesi akan melakukan studi tentang apa yang dikerjakan petani guna mengetahui bagaimana mereka hidup, dan apa yang mereka inginkan. Proyek ini memberikan pelatihan kepada petani untuk mengembangkan pembibitan; menanam dan mengelola kebun; memberikan pemahaman lebih baik tentang pasar dan membangun jaringan ke pasar; menghasilkan produksi lebih berkualitas sehingga memperoleh harga yang lebih baik; melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan; dan meningkatkan pengelolaan bentang lahan.

Di saat yang bersamaan, AgFor Sulawesi juga akan bekerjasama dengan instansi pemerintah dalam menemukan cara untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik, keadilan, juga kehidupan danbentang lahan yang terkelola dengan harmonis.

Tim AgFor Sulawesi akan menyediakan hasil penelitian mengenai isu-isu teknis tanaman, matapencaharian, dan bentang alam. Mereka pun terlibat untuk membantu pemerintah dalam menganalisa kebijakan dan perencanaan, terutama mengenai kepemilikan lahan.

Selain menyasar ke petani, proyek AgFor Sulawesi juga diperuntukkan bagi perempuan dan kelompok kurang mampu, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi pedagang dan para pelaku pasar, serta instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tiga provinsi di Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo terpilih menjadi daerah cakupan proyek ini. Sulawesi Selatan meliputi kabupaten Bantaeng dan Bulukumba dan akan beralih ke dua kabupaten lainnya; Sulawesi Tenggara di kabupaten Konawe dan Kolaka, dan akan beralih ke dua kabupaten lainnya; dan menyusul dua kabupaten di provinsi Gorontalo pada tahun ketiga proyek.

AgFor Sulawesi didanai melalui Contribution Arrangement (no. 7056890) dengan Pemerintah Kanada, diwakilkan oleh Kementerian Kerjasama Internasional yang bertindak melalui *Canadian International Development Agency* (CIDA).

World Agroforestry Center (dikenal juga dengan nama ICRAF) bertindak sebagai pimpinan organisasi pelaksana di proyek AgFor Sulawesi. Dalam penerapannya, ICRAF mendapat dukungan penuh dari Center for International Forestry Research (CIFOR), Winrock International, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Operation Wallacea Trust (OWT), Universitas Hasanuddin, Yayasan Adudu Nantu International (YANI) dan mitra lokal lainnya.

Proyek AgFor Sulawesi telah berjalan sejak tahun 2011 dan akan berlangsung selama lima tahun sampai dengan 2016.

Tahap awal yaitu 'Inception Workshop' berlangsung pada 25 Januari lalu di Makassar dan dihadiri oleh lebih dari 50 peserta dari 24 organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bantaeng, Bapak HM Nurdin Abdullah mengemukakan harapannya agar AgFor Sulawesi dapat membantu meningkatkan matapencaharian lokal, sekaligus berperan dalam proses rehabilitasi lingkungan, dan merevitalisasi daerah aliran sungai (DAS) yang penting.

Di bulan Maret dan April, AgFor Sulawesi melakukan studi dasar di area proyek untuk mengetahui tanaman yang menjadi prioritas petani. Cengkeh, kopi, karet, cokelat, durian, pala, dan merica muncul sebagai jawaban populer dari responden yang ditemui. Hasil dari studi ini kemudian digunakan untuk menentukan pelatihan-pelatihan yang tepat untuk petani.

Hingga bulan April, proyek AgFor Sulawesi telah membangun 3 pembibitan di Bantaeng (Sulawesi Selatan) dan Kolaka (Sulawesi Tenggara) yang menghasilkan 51,015 bibit dari berbagai macam tanaman.

Pelatihan mengenai pembuatan pembibitan dan agroforestri juga telah dilaksanakan di Taosu, Tinondo, Tana Towa, dan Bantaeng. Pelatihan ini melibatkan 67 petani laki-laki dan perempuan.

Bapak James M. Roshetko, Senior Project Leader AgFor Sulawesi mengungkapkan apresiasinya kepada para petani, "Saya salut dengan antusiasme petani-petani di Sulawesi Selatan dan Tenggara, dan saya sangat menghargai semangat yang ditunjukkan. Berkat keseriusan mereka, pembangunan pembibitan dan kegiatan pelatihan bahkan bisa dilakukan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan!".

Ke depannya beliau berharap agar semangat ini tetap terjaga, dan kerjasama yang telah terjalin baik dengan para mitra dapat lebih ditingkatkan lagi.

Petani di Bulukumba mengisi polybag dengan tanah pada kegiatan pelatihan
Farmers in Bulukumba filling polybags with soil as part of training activity

Sulawesi and will expand to Gorontalo. In South Sulawesi , it operates in Bantaeng and Bulukumba districts; while in South East Sulawesi, it runs in Konawe and Kolaka districts. After two years, Agfor Sulawesi will move to two other districts in each province and also start working in two districts in Gorontalo in the third year of the project.

AgFor Sulawesi is funded through a Contribution Arrangement (no. 7056890) with the Government of Canada, represented by the Minister of International Cooperation, acting through the Canadian International Development Agency (CIDA).

The World Agroforestry Centre (also knows as ICRAF) acts as the lead organization of the project, assisted by the Center for International Forestry Research (CIFOR), Winrock International, National Planning and Development Agency of Indonesia, Operation Wallacea Trust (OWT), Universitas Hasanudin, Yayasan Adudu Nantu International (YANI) and other local partners. The project has started in 2011 and will run for five years until 2016.

The initial summit of 'Inception Workshop' was conducted on January 25 in Makassar, and was attended by more than 50 participants from 24 organizations. During the event, Mr. HM Nurdin Abdullah, the head of Bantaeng district expressed that he looks forward to progress accomplished by AgFor Sulawesi project, particularly in increasing local livelihood, rehabilitating the environment and improving the important watershed areas.

On March and April, Agfor Sulawesi conducted a baseline study to gather information on the species prioritization for farmers. Clove, coffee, rubber, cacao, durian, nutmeg and pepper appeared as the common response. Later on, this data is used to help selecting relevant trainings for farmers.

Up until April, three nurseries have been established in Bantaeng (South Sulawesi) and Kolaka (South East Sulawesi). These nurseries are able to produce 51,015 seedlings of various tree species.

Trainings on nursery establishment and agroforesty have also been carried out in Taosu, Tinondo, Tana Towa, and Bantaeng. Around 67 men and women farmers involved in the event.

Mr. James M. Roshetko, Senior Project Leader of AgFor Sulawesi pointed out his appreciation for the farmers in South and South East Sulawesi. "It's amazing to see the enthusiasm, and I highly value their spirit. Their eagerness is revealed by having nurseries established and trainings conducted ahead of our schedule!".

In the future Mr. Roshetko expects to see the spirit persists, as good collaborations with partners progress.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Program Officer untuk Program AgFor Sulawesi-World Agroforestry Center/ICRAF dan dapat dihubungi pada alamat : **e.paramita@cgiar.org**

KEUANGAN PUBLIK

Menganalisa Tidak Hanya Pengeluaran Tapi Juga Penerimaan Publik

Memperkenalkan PERA Program Expenditure and Revenue Analysis

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia telah memasuki tahun ke-11 (2001-2011). Selama periode tersebut, transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2001, transfer ke daerah sebesar Rp 81,1 triliun meningkat hampir 5 kali lipat sehingga menjadi Rp 392,9 triliun pada tahun 2011. Dana perimbangan menyerap porsi anggaran terbesar dari total transfer yakni rata-rata 68% selama periode 2001-2011.

Namun jika dicermati peningkatan sumber daya fiskal daerah selama era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, nampaknya belum menunjukkan peningkatan secara merata dan signifikan aktivitas ekonomi seluruh daerah di Indonesia. Hal ini terlihat dari masih banyaknya jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin serta jumlah pengangguran yang tersebar di seluruh daerah termasuk Provinsi NTT, NTB, Papua, Papua Barat dan Jawa Timur. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pelayanan publik belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien dalam era desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini berarti pengelolaan keuangan daerah selama ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

The Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) mendukung Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten. Secara spesifik, program AIPD bertujuan untuk meningkatkan penyediaan layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. AIPD diimplementasikan di tingkat Pemerintah Nasional dan juga lima Pemerintah Provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur, beserta 20 Pemerintah Kabupaten dari 5 Provinsi, yang dimulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015.

Program AIPD memiliki tiga komponen – Pemerintah yang responsif, Masyarakat yang aktif dan Manajemen Pengetahuan. Salah satu program di bawah komponen pemerintah yang responsif adalah pelaksanaan Kajian Pengeluaran dan Penerimaan Publik (PERA). Kajian ini diharapkan dapat menyediakan berbagai informasi dan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan potensi penerimaan daerah serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Setelah proses tender yang dilakukan AIPD, Yayasan BaKTI Makassar terpilih sebagai mitra pelaksana untuk kajian PERA. Yayasan baKTI telah berpengalaman sebagai mitra Bank Dunia dalam melaksanakan studi serupa di di beberapa provinsi di Sulawesi, Maluku dan Papua. Untuk pelaksanaan Kajian PERA di daerah, Yayasan BaKTI akan bekerja sama dengan lembaga di provinsi masing masing antara lain dengan Pusat Studi Keuangan Daerah Universitas Cendrawasih, Fakultas Ekonomi Unipa di Papua Barat, Lembaga Penelitian Universitas Kristen Artha Wacana di Kupang NTT, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Surabaya, dan Lembaga Penelitian Universitas Mataram di NTB.

Kajian Pengeluaran dan Penerimaan Publik (PERA) diharapkan dapat menyediakan berbagai informasi dan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan potensi penerimaan daerah serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini termasuk efektifitas dan efisiensi dalam pengalokasian anggaran publik sesuai dengan

PROGRAM MITRA

Mengelola Perizinan, Meningkatkan Pelayanan

OLEH **HERRY SUSANTO**

Jika bisa dipersulit mengapa dipermudah? Kalimat ini begitu populer dalam banyak obrolan masyarakat tentang beragam pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Pemerintah Daerah yang kerap menempatkan pengguna layanan sebagai perahan oknum dalam mengurus berbagai perizinan. Tentunya kondisi ini tidak berlaku menyeluruh terhadap unit pelayanan yang diberikan pemerintah daerah namun demikian kondisi ini juga merupakan cermin bahwa masih banyak hal yang harus kita perbaiki dalam pelayanan publik. Melihat fenomena yang demikian ini Program KINERJA tergerak untuk memberikan bantuan teknis dalam memfasilitasi perubahan dan peningkatan manajemen pelayanan khususnya di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Melalui berbagai kegiatan yang sudah berjalan selama tujuh bulan ini, sudah terasa adanya perubahan pola pikir dari staf Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dalam memberikan pelayanan perizinan.

Konsentrasi untuk meningkatan pelayanan perizinan ini telah menjadi tekad seluruh aparat KPPM Kabupaten Barru dalam mereformasi birokrasi seperti menghapuskan pungutan tidak resmi dan biaya perizinan yang tidak sesuai dengan UU 28 tahun 2009 (UU Tentang Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah), mempermudah mekanisme pelayanan dengan penerapan SOP, membentuk TIM Teknis, membenahi *Front Office* dengan menempatkan Loket Pengaduan dan Pelayanan Informasi, meningkatkan kapasitas personil melalui *in house training*, menyamakan visi dan misi PerizinanTerpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Service Excellent*.

Sejalan dengan itu perhatian dan dukungan dari DPRD maupun SKPD lainnya seperti BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan untuk sinergi dalam hal kemudahan perizinan daerah. Kondisi ini merupakan modal yang utama terjadinya perubahan. Dalam sebuah seminar tentang pelayanan perizinan, dalam rangka ulang tahun Kabupaten Barru pada tanggal 1 Maret 2012, Bupati Barru Ir.H.A.Idrus Syukur, MSi mengatakan, "Perbaikan pelayanan perizinan adalah penting untuk peningkatan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah ini. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen untuk bekerja bersama dengan berbagai pihak dalam program ini.

Dukungan yang sama juga datang dari anggota DPRD dan dunia usaha dalam sebuah acara talkshow pada sebuah acara di radio lokal di Barru, Idham Halid, seorang anggota DPRD menyatakan, "Kami sangat mendukung dan berterimakasih atas kehadiran program KINERJA USAID. Ini adalah upaya nyata untuk memastikan kepentingan masyarakat Barru dapat dilayani dengan lebih baik".

Semakin mudahnya proses perizinan misalnya untuk pendirian usaha, tentu saja akan memberi pengaruh terhadap iklim investasi. Hasil akhirnya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap, dan angkat kemiskinan di Kabuapten Barru dapat menurun.

Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) sebagai SKPD terdepan dalam pelayanan perizinan, telah melakukan berbagai perubahan-perubahan seperti pelayanan dengan prinsip kesederhanaan, kejelasan prosedur dan biaya, kepastian waktu, kemudahan akses, kenyamanan, kedisiplinan dan keramahan petugas. Hal-hal tersebut sudah menjadi commitment dari KP3M yang telah mencanangkan tekad Maklumat Pelayanan yaitu : MASIGA yang berarti ramah, pasti dan gampang atau ikhlas bekerja, dan simpatik melayani. Itulah prinsip yang dianut oleh KP3M untuk melakukan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah.

Dalam sebuah kesempatan diskusi kelompok terarah (FGD), Ir. Abd. Samid, Ketua Forum Daerah Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barru menyatakan, "Idealnya semua jenis layanan perizinan dan non perizinan yang berhubungan dengan dunia usaha, di satukan di KP3M Kabupaten Barru".

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan layanan perizinan yang ideal tentu saja tidak serta merta teratasi

kebutuhan riil masyarakat, efektifitas pengeluaran pemerintah daerah baik secara aggregate maupun disagregat (sektoral) dan penyusunan perencanaan dan penganggaran secara konsisten, efektifitas penerimaan daerah.

Secara umum, kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja makro ekonomi baik pada pemerintah Provinsi (Papua Barat) maupun pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT, NTB, Papua, Papua Barat dan Jawa Timur, mengidentifikasi isu dan permasalahan daerah yang berkaitan dengan manajemen anggaran pemerintah baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran publik, mengembangkan kapasitas akademisi lokal yang akan menjadi mitra Pemerintah Daerah dan meningkatkan pengetahuan legilastif dan CSOs mengenai keuangan daerah dan pelayanan publik di daerahnya.

Diharapkan hasil kajian PERA dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang akan membantu Pemerintah daerah untuk melakukan alokasi anggaran ke sektor-sektor pelayanan publik yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

Tahapan kegiatan pelaksanaan PERA yang telah disesuaikan dengan ketiga jenis PERA yang akan dilakukan yaitu pembentukan dan pelatihan tim peneliti, sosialisasi PERA ke daerah kajian, penyusunan proposal dan rencana kerja penelitian, pengumpulan dan entry data, analisa data dan penulisan laporan, diseminasi temuan penelitian dan tindak lanjut atas rekomendasi Studi. Pada saat ini tim peneliti PERA sedang melaksanakan sosialisasi di kabupaten-kabupaten pelaksanaan kajian PERA

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai Program PERA, anda dapat
Kantor PERA Program
Gedung PSKMP - Kampus UNHAS Tamalanrea
Jl Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar-Sulawesi Selatan
Phone : 0411-586039 - Fax : 0411-586039

semuanya walaupun dukungan dari para pemangku kepentingan kunci telah cukup besar. Kondisi saat ini yang masih menjadi tantangan bagi Layanan Perizinan Satu Atap di Kabupaten Barru adalah masih minimnya jumlah personil terlatih dan sistem teknologi informasi yang belum berjalan dengan baik. Dengan kondisi seperti ini, kantor ini masih mesti membenahi prosedur dan mekanisme perizinan yang belum tersoialisasi dengan baik dan belum efektifnya fungsi penanaman modal.

Walaupun menghadapi tantangan dalam mewujudkan pelayanan satu atap yang efektif, terdapat beberapa praktik yang baik selama masa pendampingan teknis program KINERJA. Praktik-praktik yang baik ini utamanya ditemui dalam upaya perbaikan iklim usaha di Kabupaten Barru sebagai berikut antara lain adanya komitmen internal KP3M yang semakin baik dan dukungan dari instansi terkait. Selain itu penerapan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang disesuaikan dengan paradigma PTSP sebagai sebuah kekuatan untuk meningkatkan angka formalisasi usaha dan IKM terkait layanan perizinan.

Patut disyukuri bahwa telah ada perubahan sikap dan mental pegawai KP3M yang memberikan pelayanan secara profesional merupakan suatu investasi jangka panjang untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi di Kabupaten Barru. Perubahan ini diiringi dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang membaik. Kini IKM atas pelayanan perizinan di Kabupaten Barru menunjukkan angka 77,57 atau termasuk dalam kategori B (= Baik) .

Perkembangan perbaikan layanan pada kantor pelayanan perizinan bahkan didukung oleh regulasi berupa Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang menjadi landasan yuridis formla untuk melaksanakan perbaikan pelayanan (lihat box). KP3M sebagai pendahulu dalam perbaikan pelayanan publik bidang perizinan di Kabupaten Barru saat ini menajdi kekuatan yang diandalkan oleh Pemerintah Daerah.

Pendekatan yang dilakukan oleh Program KINERJA dalam program ini akan direplikasi pada SKPD lainnya di jajaran Pemerintah Kabupaten Barru. Beberapa di antaranya adalah metodologi pelaksanaan survey IKM dan penyusunan Prosedur Operasi Standard (POS).

KP3M sebagai pilot project perbaikan pelayanan publik bidang perizinandi Kabupaten Barru saat ini menjadi kekuatan yang diandalkan oleh Pemerintah Daerah dan pendekatan yang dilakukan oleh Program KINERJA akan dilakukan replikasi pada SKPD lainnya, misalkan metodelogi pelaksanaan survey IKM dan penyusunan POS yang dikembangkan akan sebaiknya diterapkan juga di Instansi lainnya di Kabupaten Barru.

Dalam waktu dekat, KP3M Kabupaten Barru berencana akan melakukan beberapa pembenahan bersama para stakeholder utama dunia usaha. Upaya-upaya tersebut antara lain dalam hal reformasi birokrasi dengan menyempurnakan ketersediaan informasi mengenai biaya, persyaratan dan mekanisme perizinan agar diketahui dengan baik oleh masyarakat. KP3M juga akan mengupayakan untuk mempersingkat waktu penerbitan izin menjadi tidak lebih dari dua hari.

Dari program ini, Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi kebutuhan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui formalisasi usaha yang meningkat hingga tigapuluh persen dari tahun sebelumnya. Selain itu akan diadakan kerjasama dengan pihak perbankan untuk memudahkan akses kredit bagi pelaku usaha yang telah mengantongi izin usaha.

Kebijakan Daerah pendukung Layanan Perizinan Satu Atap yang efektif

Beberapa kebijakan daerah telah dihasilkan selama pendampingan bantuan teknis KINERJA sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Perizinan Non Retribusi
2. Keputusan Bupati Barru No. 121 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan kewenangan kepada KP3M Kab. Barru.
3. Keputusan Bupati Barru No. 122 Tahun 2012 tentang SK TIM Teknis.
4. Surat Keputusan Kepala KP3M No. 10 tahun 2012 tentang Maklumat Pelayanan di KP3M Barru
5. Peraturan Bupati Barru tentang Standar Pelayanan (SP) di KP3M Kab. Barru (Dalam proses pengesahan)
6. Peraturan Bupati Barru tentang SOP Pelayanan Perizinan di KP3M Barru (Dalam proses pengesahan)
7. SK Bupati Barru tentang Mekanisme Pengaduan di KP3M Kab. Barru (Dalam proses pengesahan)
8. SK Bupati Barru tentang Mekanisme Insentif (Dalam proses pengesahan)

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis ada Program Coordinator pada Program KINERJA USAID di Sulawesi Selatan dan dapat dihubungi melalui email **hsusanto@kinerja.or.id**

PRAKTIK CERDAS TERKINI

Sekolah a la Rakyat, Sekolah Jumilah

OLEH **STEVENT FEBRIANDY**

Di ruangan ukuran 5x7 meter itu, anak-anak tertawa riang dan berkumpul. Masing-masing asyik dengan kegiatannya. Ada yang menulis, menggambar, dan menyanyi. Dari kejauhan sesekali Jumilah melihat mereka dengan tersenyum sambil menjawab pertanyaan dari wartawan KOMPAS yang pada saat itu sedang mewawancarainya. "Saya sempat berpikir untuk berhenti, karena saya tidak tahu harus berbuat apa lagi," katanya. Hanya ketika melihat anak-anak yang sedang bermain, pikiran itu hilang dan Jumilah terus melanjutkan apa yang sudah ia rintis sejak tahun 2005.

Saat itu Yayasan SANTAI tengah memperkenalkan sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin pada beberapa dusun di desa Batu Layar. Sepintas program ini tidak ada bedanya dengan berbagai program pengentasan kemiskinan lain yang pernah dilakukan di desanya. Program ini menggunakan pendekatan CLAPP (Community Led Assessment and Planning Process) yang digunakan dalam perumusan dan penggalian gagasannya. Dalam program ini kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga, tetapi juga pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam menemukenali berbagai permasalahan dan mencari solusi mandiri berkelanjutan tanpa meninggalkan kearifan lokal.

Semakin aktifnya Jumilah dalam program, membuatnya terpilih sebagai pengurus KAHURIPAN, sebuah lembaga lokal yang menjadi media pembelajaran kewirausahaan. Ia pun mulai rajin belajar, termasuk belajar berhitung. Seiring dengan keaktifannya di KAHURIPAN, terbangun pula rasa percaya diri dan keberanian Jumilah berbicara di depan umum.

Konsistensi dan komitmen untuk terus berubah dan meningkatkan diri mendorong Jumilah mengajak beberapa temannya untuk membentuk kelompok belajar di dusunnya. Kelompok belajar ini kemudian lebih dikenal sebagai Sekolah Jumilah. Sebanyak 5 pos belajar tersebar di Dusun Duduk bawah dan Dusun Duduk Atas di Desa Batu Layar, Lombok Barat, NTB. Murid-murid di Sekolah Jumilah adalah anak-anak yang tidak bersekolah di sekolah umum, mereka yang menikah di usia remaja, dan orang dewasa yang buta aksara. Hingga kini sebanyak 40 anak dan 10 hingga 20 orang dewasa per bulan mengikuti kegiatan belajar di sekolah ini. Awalnya, Jumilah sendiri yang mengajar baca-tulis dan berhitung, namun kini beberapa warga turut aktif mengajar di sekolah ini. Para murid tidak hanya belajar baca-tulis dan berhitung, namun kini juga diajarkan pengelolaan lingkungan hutan, peternakan, pengelolaan ekonomi keluarga, dan keterampilan usaha sederhana lainnya.

Tahun 2010 Jumilah ingin mengembangkan sekolahnya, walau pun baru bisa menulis dan membaca, ia nekat menulis untuk bersurat kepada Gubernur NTB M Zainul Majdi. Perasaan campur aduk ketika ia menyurati sang gubernur, antara takut dan segan tetapi dorongan untuk mengembangkan sekolahnya begitu besar sehingga mengalahkan rasa takutnya. Hasilnya luar biasa, Gubernur NTB langsung datang melihat Sekolah Jumilah dan memberikan bantuan Rp 5 juta untuk merenovasi tempat yang belajar anak-anak.

Sekarang buku dan peralatan tulis disimpan di lemari kayu sederhana. Tempat belajar lebih luas dilengkapi dengan papan tulis dan beberapa bangku. Lantai tempat belajar disemen dengan rapi sehingga kelihatan sangat bersih serta atap yang sudah dilapisi seng baru, sehingga tempat belajar terlindung dari panas dan hujan. Tampak beberapa anak asyik dengan bermain dengan anak lainnya dan mereka sangat menikmati tempat baru tersebut. Dengan dikelilingi pohon lebat dan di depan kelas terdengar suara aliran sungai, maka tempat baru untuk belajar anak-anak semakin nyaman. "Sekarang rata-rata anak yang datang berjumlah 42 anak. Mereka biasanya duduk di kelas 3 dan 4 SD. Yang paling banyak datang di hari Minggu," sahut Jumilah sambil tersenyum.

Tahun 2011 juga menjadi tahun yang spesial untuk Jumilah. Ia terpilih bersama 53 perempuan lainnya yang menerima penghargaan Tupperware She Can! Award 2011. Para perempuan dari berbagai profesi dan berasal dari seluruh daerah di tanah air ini, dinilai pantas menerima penghargaan atas kontribusi yang positif terhadap lingkungan sosial mereka, sehingga memajukan lingkungan dan orang-orang sekitarnya. Sebanyak 53 perempuan yang berhak atas penghargaan ini, dinilai telah mengusung apa yang dikampanyekan

Tupperware yakni enlighten (mencerahkan), educate (mendidik) dan empower (memberdayakan) dirinya, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Jumilah sendiri tidak menyangka apa yang dia sudah perbuat sampat saat ini diakui dan diberi penghargaan oleh orang lain. Hal ini menguatkan tekad Jumilah untuk terus mempertahankan Sekolah Jumilah dan berharap sekolahnya bisa terus berkembang.

Liputan mengenai kegiatan Sekolah Jumilah juga menarik pemangku kepentingan lain untuk datang. Beberapa media lokal dan nasional, baik cetak, online serta elektronik telah mengunjungi tempat belajar anak-anak ini. Selain itu, bukan hanya anak-anak yang bermain dan belajar di sekolah, tempat ini pun menjadi ajang kumpul bagi ibu-ibu di Desa Batu Layar. Dari kumpul-kumpul tersebut mereka memperjuangkan agar listrik bisa masuk ke desa mereka. Perjuangan yang tiada henti dengan mengirimkan surat permohonan buka akses listrik di tempat mereka akhirnya membawa hasil. Awal tahun 2011 listrik masuk ke Desa Batu Layar. Kabel listrik masih harus dibayar oleh warga desa, namun Jumilah menganggap hal ini bisa dilaksanakan dan terwujud ketika ibu-ibu di desa bisa bertemu serta merencanakan kegiatan bersama-sama yang menghasilkan kebaikan untuk desa mereka.

Jumilah merasa bahwa perjuangan yang ia lakukan sekarang belum tuntas. Masih banyak yang harus dilakukan. Ia merasa bahwa masih banyak yang ia bisa lakukan untuk anak-anak dan warga Desa Batu Layar. Untuk sementara Sekolah Jumilah akan terus berjalan dan pendekatan yang dilakukan masih sama. Sepanjang anak-anak datang untuk bermain dan belajar di Sekolah Jumilah hal itu sudah sangat memuaskan bagi dirinya. "Namanya juga anak-anak, dunia anak kan, dunia bermain, jadi biarkan anak-anak bermain dan belajar sesuka hati mereka," kata Jumilah sambil terus memperhatikan anak-anak yang bermain.

INFORMASI LEBIH LANJUT

FOR MORE INFORMATION

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai praktik cerdas Sekolah Jumilah, Anda dapat menghubungi :
afdhaliya@bakti.org

TEKNOLOGI PEDESAAN

Kopernik ke Papua: Memperkenalkan Teknologi Tepat Guna

OLEH **LINCOLN RAJALI SIHOTANG**

Bagi orang yang suka berpetualang seperti Saya, mengunjungi daerah-daerah terpencil yang belum banyak dikunjungi orang pasti menjadi impian. Dari beberapa pulau dan daerah terpencil di Indonesia, Papua sudah lama menjadi salah satu tempat tujuan yang ingin saya kunjungi. Beberapa waktu lalu, impian ini menjadi kenyataan. Saya akhirnya menginjakkan kaki untuk yang pertama kalinya di Papua.

Pada tanggal 29 Mei yang lalu, Kopernik diundang oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) untuk mengadakan pameran teknologi di Kabupaten Sarmi, Papua untuk memperkenalkan teknologi-teknologi tepat guna kepada masyarakat disana. Pelaksanaan pameran teknologi ini bertepatan dengan peresmian sebuah radio komunitas di Sarmi yang dibangun oleh PPMN bekerja sama dengan KBR68H, beberapa lembaga donor dan juga masyarakat Sarmi.

Perjalanan ke Sarmi lumayan melelahkan tapi juga menginggalkan pengalaman yang sangat menarik. Saya dan dua orang rekan kerja dari Kopernik memulai perjalanan dari Denpasar, Bali. Penerbangan dari Denpasar ke Jayapura hanya ada pagi-pagi sekali. Pesawat kami terbang jam 02.15 menuju Jayapura dengan transit di Timika.

Jam 08.40 kami tiba di Jayapura dan langsung meneruskan perjalanan ke Sarmi dengan sebuah mobil rental. Jalan ke Sarmi sebagian besar masih belum diaspal dan berbatu. Karena kondisi jalan ini dan kurang istirahat di pesawat, perjalanan terasa sangat melelahkan dan kami harus berhenti beberapa kali untuk istirahat. Perjalanan ke Sarmi semakin menantang ketika ban mobil kami bocor terkena paku di salah satu jembatan kayu yang kami lewati. Beruntung mobil yang kami naiki mempunyai ban cadangan. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan lagi dan setelah total 9 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di Kota Sarmi, ibukota Kabupaten Sarmi.

Pagi hari keesokan harinya, kami mengunjungi stasiun radio yang akan diresmikan dan kami melakukan beberapa persiapan tech fair. Kami juga sempatkan melihat kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Berdasarkan data dari sebuah surat kabar disana, penduduk Kabupaten Sarmi berjumlah sekitar 35.335 jiwa dan sekitar 32% dari penduduk ini tinggal di Kota Sarmi. Kebanyakan masyarakat menggantungkan hidup pada pertanian dan sebagian sebagai nelayan. Ketika kami mengunjungi pasar tradisional, kami juga melihat banyak ibu-ibu yang menjual pinang karena mengunyah pinang sudah menjadi tradisi turun-menurun di Sarmi.

Anak-anak menenteng lampu tenaga surya yang berbeda-beda

Kebanyakan masyarakat menggunakan air sumur dan hujan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari termasuk untuk minum. Untuk memasak, masyarakat juga masih mengandalkan kayu bakar yang dikumpulkan dari kebun atau hutan. Sarana infrastruktur sangat terbatas apalagi diluar Kota Sarmi. Dibandingkan dengan beberapa daerah di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur yang pernah saya kunjungi, Sarmi adalah salah satu daerah yang paling tertinggal, padahal kaya akan sumber daya alam. Hal ini diperparah lagi dengan tingginya harga-harga kebutuhan pokok dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Sesaat sebelum peresmian radio komunitas tanggal 29 Mei, Kopernik memberikan presentasi singkat tentang prakarsa Kopernik dalam menyebarluaskan teknologi tepat guna untuk masyarakat miskin di beberapa negara termasuk Indonesia. Setelah acara peresmian radio, Kopernik memamerkan dan juga mendemonstrasikan berbagai macam teknologi-teknologi tepat guna dari saringan air Nazava, kompor hemat energi Envirofit, berbagai macam lampu tenaga surya, mesin pemipil jagung engkol, kelambu PermaNet sampai kepada Self-Adjustable Glasses, kacamata yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata.

Teknologi-teknologi ini sangat diminati oleh para pengunjung tech fair dari para pejabat pemerintah yang hadir di acara dan juga anggota masyarakat. Para pengunjung dengan antusias mencoba dan satu persatu teknologi-teknologi tersebut dan juga menanyakan bagaimana mereka bisa mendapatkan teknologi tersebut. Para pengunjung juga kami minta untuk mengisi satu form untuk memilih produk teknologi yang menurut mereka paling dibutuhkan di Sarmi. Dari hasil pilihan pengunjung, saringan air Nazava, Kompor Envirofit, kaca

Bupati Sarmi mencoba *Self-Adjustable Glasses*, kacamata yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata

Salah seorang pengunjung meminum air yang disaring dengan Saringan Air Nazava dari air hujan

mata *Self-Adjustable Glasses* dan lampu tenaga surya d.light S250 merupakan produk teknologi yang paling diminati.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Kopernik Project Officer dan dapat dihubungi melalui email **lincoln.rajali@kopernik.info**
Informasi mengenai kegiatan Kopernik dapat diikuti melalui website **www.kopernik.info** atau
Facebook **www.facebook.com/KopernikIndonesia**

INSPIRASI BaKTI

Desa Berdata, Rakyat Berdaya

OLEH **STEVENT FEBRIANDY**

Berita tentang rencana pembuatan Peta Sosial ini dikutip dari sebuah media lokal di Nusa Tenggara Barat. Peta Sosial adalah peta yang dibuat secara partisipatif oleh warga untuk menggambarkan sebaran peringkat kesejahteraan penduduk (kaya, sedang, miskin dan sangat miskin) serta akses warga terhadap sumber-sumber daya alam yang terdapat di sekitar desa. Dalam menyusun Peta Sosial, warga sendirilah yang menentukan indikator-indikator kesejahteraan, seperti rumah, lahan, kendaraan, penghasilan, dan sebagainya. Peta sosial yang disusun oleh warga, lalu dijiplak hingga menjadi peta digital.

> "Pemerintah Kabupaten Dompu berencana membuat Peta Sosial tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp 2 miliar dari APBD. Peta sosial ini akan menjadi acuan dalam mendata warga miskin di daerah ini. Pada tiap desa, warga yang terdata sebagai warga miskin akan diberi label merah dan warga mapan diberi label warna biru. Mewujudkan itu, dalam waktu dekat akan dibuat kontrak kerja antara Bupati dengan Kepala Desa"

Peta sosial digital dapat mengandung banyak informasi dari data-data yang dikumpulkan warga. Sebuah Peta Sosial Digital bisa saja mengandung ribuan peta tematik berdasarkan kategori yang diinginkan. Peta kemiskinan hanyalah satu di antaranya. Peta lain seperti lahan, jalan, infrastruktur, dampak pembangunan, bahkan simulasi dampak bencana juga dapat mengisi informasi sebuah Peta Sosial Digital. Sajian informasi yang berlapis dan saling melengkapi inlah yang kemudian membuat Peta Sosial Digital menjadi hal yang penting dalam pembangunan.

Hal tersebut kemudian mendorong kerjasama Lembaga Mitra Turatea (LMT) dengan ACCESS-AusAID dan Pemerintah Kabupaten Jeneponto di tahun 2007 untuk melakukan penguatan dan fasiltiasi perencanaan pembangunan melalui pembuatan peta sosial di Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Peta sosial yang disusun sejak tahun 2007 itu kini telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk mencegah mark-up perencanaan teknis di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dalam RPJMDes dan RKPDes serta pada Musrenbangdes.

Inspirasi BaKTI mengangkat upaya cerdas ini pada 7 Juni 2012 dan mengemasnya dalam sebuah diskusi bertajuk Peta Sosial Desa untuk Perencanaan Pembangunan. Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Jeneponto, Meryani, yang mewakili Bupati Jeneponto mengatkan bahwa Peta Sosial Digital bahkan juga digunakan oleh jajaran SKPD Pemerintah Jeneponto dalam menyusun Renstra SKPD 5 tahunan dan menyusun RKP SKPD tahunan, khususnya dalam menentukan penerima manfaat program.

"Kelebihan peta sosial digital adalah dapat digunakan oleh banyak pihak, karena sistem pemetaan telah memenuhi standard kartografi sehingga proses penambahan data dan pemanfaatannya dapat dilakukan dengan mudah", jelas Rahmat, Direktur Lembaga Mitra Turatea. LMT telah melakkan penilaian atas pemanfaatan dan pengolahan data tersebut dan mengembangkan sebuah aplikasi yang mengkonversi dengan program yang didesain sendiri. Berbasis Corel Draw, LMT ingin menunjukkan kondisi nyata desa, khususnya tingkat kesejahteraan, hasil dari pemetaan berbasis masyarakat.

"Aplikasi ini berbasis open source yang berarti juga dapat digunakan oleh siapa saja. Setelah melalui proses uji coba dan

pengambangan dalam setahun, akhirnya aplikasi ini juga dapat digunakan dengan baik oleh aparat desa dalam wilayah Kecamatan Arungkeke",tambah Rahmat.

Aplikasi ini adalah sistem pengolahan data sosial berbasis GIS yang menghasilkan Peta Sosial Desa Digital dan disesuaikan dengan standar pemetaan digital sehingga mudah terintegrasi. Dengan sistem komputer juga memudahkan dalam proses update dan visualisasi data. Prototipe aplikasi ini telah digunakan di seluruh desa di Kecamatan Arungkeke. Dalam waktu dekat aplikasi ini akan digunakan lebih luas untuk menghasilkan Peta Sosial Desa Digital untuk seluruh desa di Kabupaten Jeneponto.

"Yang sangat penting untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebenarnya adalah bagaimana pemetaan ini bisa memberikan kontribusi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi, umpamanya," jelas Rahmat. Di pemetaan spasial yang bisa dikeluarkan adalah informasi setiap program yang dilakukan oleh SKPD, sehingga menghindari penumpukan program di wilayah tertentu dan bisa memetakan program apa saja yang dilakukan oleh SKPD.

Proses partisipatif dibangun sejak awal mula kegiatan dijalankan. Pengumpulan data sudah melibatkan masyarakat itu sendiri. "Ini adalah inisiatif masyarakat, para kader pemberdayaan masyarakat lah yang melakukan rangkaian proses mulai dari awal hingga akhir. Kami hanya melakukan penguatan dan pelatihan. Setelah itu melakukan fasilitasi dan mendampingi mereka,"imbuh Rahmat dengan bersemangat.

Mengutip Brian Tracy seorang CEO perusahaan multinasional dari Amerika yang mengatakan "All successful people are big dreamers. Their imagine what their future could be, they work everyday toward that goal or purpose". Orang yang sukses memiliki mimpi yang besar dan bisa membayangkan masa depannya dengan bekerja setiap hari untuk mewujudkan tujuannya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh LMT dan warga desa Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Mereka memiliki mimpi untuk mengalami perubahan dalam hidup mereka. Mimpi itu dimulai dengan sesuatu yang sederhana dan sering tidak terpikirkan oleh orang lain.

"Desa berdata, warga berdaya, kita berharap itu terjadi baik itu di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia," ujar Rahmat menutup penjelasannya.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Jika Anda mengetahui upaya-upaya yang inspiratif untuk diangkat dalam Inspirasi BaKTI, atau jika ingin mengetahui topik-topik yang sebelumnya dipilih menjadi Inspirasi BaKTI, Anda dapat mengirim email kepada kami melalui **info@bakti.org**

Inspirasi BaKTI adalah sebuah ruang untuk berbagi insiatif cerdas, pelajaran dari keberhasilan yang menginspirasi. Diadakan sebulan sekali di backyard BaKTI, acara ini terbuka bagi siapa saja yang perduli terhadap kemajuan pembangunan. Dalam Inspirasi BaKTI, peserta tidak hanya mendapatkan inspirasi dari narasumber tetapi juga menambahkan ide untuk pengembangan sebuah inisiatif demi kemajuan Kawasan Timur Indonesia.

PEACH UPDATE

MEMBANGUN PENGETAHUAN PUBLIK

OLEH **LUNA VIDYA**

Mengupayakan terbangunnya hubungan antar pihak pengelolaan anggaran publik sekaligus mendorong keterlibatan pihak masyarakat madani dan media dalam proses-proses perencanaan juga pemanfaatan anggaran publik terutama terkait layanan publik merupakan salah satu dari tujuan yang hendak dicapai dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam program PEACH.

Sepanjang bulan Mei telah dilaksanakan tiga NEWS Café, masing-masing di Papua, Gorontalo dan di Sulawesi Selatan. Selain NEWS Café, juga berlangsung Road Show untuk diseminasi Hasil Laporan Analisis Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

NEWS Café Papua

TOPIK : **POTRET BERITA PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK**

Triwulan I Papua, hasil media monitoring yang menjadi dasar dari diskusi dalam NEWS Café ini antara lain, disharmonis hubungan antara eksekutif dan legislatif yang menyebabkan mundurnya pengesahan APBD tahun 2012, besarnya ketergantungan daerah pada dana transfer pusat, tapi di sisi lain, lemahnya atau pun belum adanya pengawasan terhadap dana transfer itu dan mensinergikannya dengan kebijakan-kebijakan startegis publik di daerah. Besarnya peliputan media mengenai dinamika pengelolaan publik di kabupaten,seharusnya dapat menjadi sumber informasi yang penting mengenai kualitas pengelolaan publik dan inisiatif strategis pemerintah daerah. Masih sedikit berita yang ditulis atau dipublikasikan dengan maksud meningkatkan pengetahuan publik mengenai seluk beluk maupun proses yang up to date terkait anggaran publik maupun pelayanan publik di sektor strategis.

Dalam diskusi ini terungkap pentingnya mengidentifikasi persoalan-persoalan yang mendasar mengenai keuangan publik serta pelayanan publik yang dihasilkannya, identifikasi dan rumusan ini kemudian dapat mengarah pada penyelarasan upaya untuk meningkatkan layapan publik di Papua, dengan dukungan atau fasilitasi para pendukung kepentingan. Selain itu, diskusi ini juga mengulik bahwa pendidikan publik lewat media massa merupakan 'peluang' yang dapat dikerjasamakan oleh para pendukung kepentingan untuk memperkuat upaya pendidikan dan keterlibatan publik dalam isu-isu pengelolaan publik.

NEWS Café Gorontalo

TOPIK: **MENGHEMAT APBD APBD GORONTALO**

Diskusi dengan presentasi kehadiran peserta perempuan hampir 50%, serta disiarkan langsung melalui dua radio, membawa ke permukaan topik pemetaan peran media dalam isu pengelolaan keuangan daerah. Dalam peran yang diharapkan dapat mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan pelayanan publik yang lebih baik, maka media sendiri tidak bisa menutup mata dari kapasitas jurnalis peliput isu bersangkutan.

Merupakan sebuah kebutuhan untuk membekali jurnalis peliput isu pengelolaan keuangan publik dengan pengetahuan mengenai proses, mekanisme, serta untuk memahami berderet –deret angka dalam APBD. Kebutuhan terhadap pengetahuan ini harus ditanggapi positif oleh pemerintah. Sehingga kemampuan untuk menterjemahkan issue pengelolaan keuangan publik ke dalam konteks yang lebih dekat dengan masyarakat juga menjadi salah satu indikator kualitas komunikasi antarpihak pemerintahan, maupun antara pemerintah dengan masyarakat.

NEWS Café Sulawesi Selatan

TOPIK : **PRO KONTRA PENDIDIKAN GRATIS**

Dalam diskusi ini nara sumber diskusi Dr. Agus Salim dari Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembanan Kebijakan dan Manajemen (P3KM) Universitas Hasanuddin. Berangkat dari pengumpulan data untuk Analisis Belanja Publik Provinsi Sulawesi Selatan yang diluncurkan Februari 2012, diskusi ini membahas isu-isu terkait pembenahan apa yang perlu dikerjakan mengenai sektor pendidikan.

Program pendidikan gratis Sulsel perlu menerapkan pendekatan yang berbeda dalam pendidikan gratis, dengan indikator keberhasilan yang diarahkan pada berapa jumlah anak usia sekolah yang benar-benar sekolah, dan berapa lama anak-anak usia sekolah bisa tetap duduk di bangku sekolah. Dua indikator inilah yang sepatutnya diajukan,bukan berapa besar jumlah anggaran yang dikeluarkan,berapa jumlah gedung sekolah yang didikan, banyak gedung sekolah yang didirikan, ataupun berapa guru yang diangkat. Hal yang lain adalah penggalian isu mengenai kontribusi program pendidikan gratis ini terhadap IPM Sulawesi Selatan, dan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi Angka Melek Huruf, Orientasi input kebijakan ini dengan catatan-catatan kritis yang menyertainya seperti lemahnya komitmen kabupten kota, dan pola penganggaran berbasis sekolah, bagaimanapun telah memunculkan sinergitas antara pemerintah provinsi dengan kabupten/kota dalam pembiayaan pembangunan. Selain itu kebijakan ini telah memperkuat aspek legalitas, proses dan mekanisme implementasi serta perlunya mencermati variable perhitungan besaran bantuan pendidikan gratis.

Catatan substansial lain dari diskusi ini adalah porsi pembagian biaya pendidikan antara Provinsi (40%) dan Kabupaten Kota (60%) yang mungkin perlu dilihat kembali. Juga pentingnya program ini mendapatkan komitment seluruh Kabupaten/Kota.

Dari pelaksanaan kegiatan di atas: ada beberapa hal yang harus dijadikan catatan: adanya kebutuhan untuk meningkatkan bukan saja kemampuan untuk memahami APBD, tapi juga untuk mengakses informasi disekitar APBD. Ke dua hal ini mempengaruhi kualitas informasi yang diberikan oleh stakeholder isu pengelolaan keuangan daerah kepada publik, dan pada akhirnya mempengaruhi tumbuhnya pengetahuan publik mengenai isu keuangan publik, lebih khusus lagi mengenai upaya pemerintah untuk melakukan transparansi dan percepatan pembagunan di provinsi yang bersangkutan.

Quotes

"Transparansi yang tidak setengah-setengah dari pemerintah merupakan insentif bagi para pembuat keputusan untuk bertindak dalam semangat kepatuhan terhadap aturan. Kemampuan masyarakat untuk dengan mudah memeriksa dan meninjau kinerja dan laporan keuangan lengkap dari badan pemerintah menngarah pada keyakinan dan kepercayaan di sektor publik. Pengungkapan yang penuh atas kinerja, akan membuat lembaga-lembaga publik berfokus pada hasil yang sebenarnya [...], bukan kuantitas kegiatan. "

"Full transparency in government provides an incentive for decision makers to act in a spirit of compliance. The capability of the public to easily examine and review the full performance and financial statements of government entities leads to confidence and trust in the public sector. Full performance disclosure forces public agencies to focus on actual outcomes [...] , not the quantity of activities."

Public Financial Management Blog, posted by Michel Lazare (http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2008/05/the-importance.html)

Calender Event

JULI - SEPTEMBER 2012

NEWS Café Jawa Timur
14 Juli 2012
Pelatihan Media Gorontalo
28 Juli 2012
Pelatihan Media Papua : Membaca APBD
Agustus 2012
NEWS Café Papua, Pendidikan dan Pembangunan Papua
Agustus 2012
NEWS Café Sulawesi Selatan
Agustus 2012
NEWS Café Sulawesi Utara
Agustus 2012
Road Show Papua
September 2012
Media Tour Papua
September 2012

PNPM-RESPEK

Pelatihan Barefoot Engineers di Papua

Barefoot Engineers Training in Papua

OLEH **MILA SHWAIKO**

Pada tahun 2007, para gubernur Papua dan Papua Barat yang dipilih langsung memperkenalkan sebuah program baru pembangunan berbasis masyarakat, menghubungkan bantuan bagi komunitas sebesar 100 juta rupiah ke 4.000 desa di dua provinsi untuk mendanai kegiatan pembangunan di berbagai bidang termasuk nutrisi dan ketahanan pangan; eduksi; pelayanan kesehatan dasar; infrastruktur perdesaan; dan mata pencaharian. Pada 2008, program gubernur yang bertajuk RESPEK – Rencana Pembangunan Strategis Perdesaan – diintegrasikan ke dalam Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM Mandiri Perdesaa), mendatangkan ratusan tenaga fasilitator terlatih profesional dan para insinyur untuk membantu masyarakat dalam merencanakan dan menerapkan rencana mereka.

Satu tantangan utama yang dihadapi oleh program PNPM-RESPEK adalah sangat kurangnya fasilitator masyarakat yang terlatih, khususnya para insinyur lapangan. Program ini membutuhkan lebih dari 400 fasilitator teknis namun hanya mampu merekrut kurang dari setengahnya, kebanyakan berasal dari luar Papua, dan dengan tingkat pergantian yang tinggi.

Pada Februari 2012, sebanyak 300 posisi fasilitator teknis kosong. Untuk mencari penyelesaian akan masalah ini, PNPM Support Facility dan Konsultan Manajemen Nasional PNPM mendesain ulang sebuah program khusus, yang disebut Pelatihan Barefoot Engineer bagi para alumni SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan di Papua dan Papua Barat untuk belajar dasar-dasar teknik sipil, mesin, pembangkit listrik mikro-hidro, analisis konstruksi, perencanaan keuangan dan desain insratruktur, supervisi konstruksi dan implementasi, fasilitasi sosial dan penguatan. Alumni pelatihan ini nantinya aka direkrut sebagai fasilitator teknis di bawah dalam kerangka PNPM Perdesaan di daerah tersebut. Pelatihan ini akan mengkombinasikan metode belajar di dalam ruangan dan aplikasi praktis untuk beberapa isu infrastuktur

In 2007, Papua's and West Papua's first directly elected governors introduced an ambitious new community-driven development program, channeling community grants of 100 million rupiah each to over 4,000 villages in the two provinces to fund development activities in the areas of nutrition and food security; education; primary health care; village infrastructure; and economic livelihoods. In 2008, the governors' RESPEK -Strategic Village Development Plan - was integrated with the National Community Empowerment Program (PNPM Mandiri Rural), bringing hundreds of professionally trained development facilitators and field engineers to assist communities n planning and implementing these funds.

One major challenge facing the PNPM-RESPEK program was a chronic shortage of qualified community facilitators, especially field engineers. The program required over 400 technical facilitators but was only been able to recruit less than half of the needed number, mostly from outside Papua, and with very high turnover. In February 2012, almost 300 of the technical facilitator positions were empty. In order to address this acute and chronic shortage, the PNPM Support Facility and PNPM National Management Consultants redesigned a special program, called Barefoot Engineer Training, to provide local senior high school graduates and technical school graduates from Papua and West Papua with basic training in civil engineering, mechanics, micro-hydro power generation, construction/building analysis, budget planning and infrastructure design, implementation and construction supervision, social facilitation and empowerment. They will then be recruited as technical facilitators under PNPM Rural in the region. The training will combine classroom teaching and practical application of the most common small-scale village infrastructure issues. The 300 participants will be recruited with priority given to indigenous Papuans and women under the age of 35.

The existing training modules will be simplified so that they are applicable in responding to context of local dynamics and culture. Materials used for the 2008-2009 Barefoot Training will be reviewed and adjusted by the team of technical instructors. This team will be comprised of engineering lecturers recruited from community development projects building basic village infrastructure partnered with engineering lecturers from Universitas Cendrawasih (UNCEN) and PNPM-RESPEK engineering and senior facilitators. In addition, special modules on Papuan culture, engagement

desa skala kecil yang paling umum. Sebanyak 300 partisipan akan direkrut dengan mengutamakan warga Papua dan perempuan yang berumur di bawah 35 tahun.

Berbagai modul training yang ada akan disederhanakan sehingga dapat diaplikasikan dalam menjawab konteks dinamika dan budaya lokal. Bahan-bahan yang digunakan dalam Pelatihan Barefoot akan ditinjau dan disesuaikan oleh tim instruktur teknis. Tim ini akan terdiri dari para pengajar teknik yang direkrut dari proyek-proyek pengembangan masyarakat yang membangun infrastruktur dasar perdesaan dan bermitra dengan para dosen teknik dari Universitas Cenderawasih (UNCEN) dan para insinyur dan fasilitator senior PNPM-RESPEK. Sebagai tambahan, modul-modul khusus tentang budaya masyarakat Papua, keterkaitannya dengan pemimpin dan lembaga adat, kepekaan gender dan HIV/AIDS akan dikembangkan dan dihasilkan dari para tenaga ahli Papua termasuk para ahli antropologi dari UNCEN, LSM lokal, dan mitra pembangunan berbasis lokal.

Didanai oleh Multi Donor Trust fund dan dikelola oleh PNPM Support Facility (PSF) Bank Dunia, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) menjadi mitra utama dalam penerapan gelombang ketiga Pelatihan Barefoot Engineer untuk periode Juni 2012 hingga Desember 2013.

with customary (adat) leaders and institutions, gender sensitivity and HIV/AIDS awareness training will be developed and delivered by competent Papuans including UNCEN's anthropology department, local NGOs, and locally-based development partners.

Funded by the Multi Donor Trust Fund managed by the PNPM Support Facility (PSF) of the World Bank, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) was engaged as the lead implementing partner for the third wave Barefoot Engineer Training program from June 2012 until December 2013.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program pelatihan ini, Anda dapat menghubungi :
Yusran Laitupa pada email **yusran@bakti.org**

Memahami Realitas Kemiskinan

OLEH **SAIFUDDIN, M.AG**

Sudah menjadi hukum alam bahwa realitas kehidupan manusia adalah untuk berdinamika. Dinamika inilah yang secara alamiah dan tanpa disadari melahirkan beragam perbedaan baik yang nampak dan nyata untuk dilihat maupun berupa pemikiran serta sudut pandang mengenai sesuatu. Tidak terkecuali fenomena kemiskinan yang akhir-akhir ini mulai menjadi bahan kajian dan diskusi baik pada tingkat akar rumput sampai pada penentu kebijakan di negeri ini.

Ada banyak sinyalemen yang berkembang dan berbagai interpretasi dengan sudut pandang keilmuan masing-masing. Namun ada satu titik persamaan yang dapat menyatukan semua pihak yaitu kemiskinan yang juga adalah keniscayaan sebuah kehidupan. Negeri ini sebenarnya sangat kaya dengan sumber daya alam yang dimiliki namun karena pengelolaan yang tidak terarah dan kuatnya kepentingan untuk saling menguasai sehingga melahirkan kesenjangan sosial yang semakin tidak terkendali. Pada diskusi Forum KTI Wilayah Sulawesi Barat baru-baru ini didiskusikan bahwa kemiskinan ternyata tidak selalu identik dengan kemalasan dan kemiskinan tidaklah identik dengan orang miskin. Sebagai sebuah contoh masyarakat nelayan disekitar pulau-pulau sepanjang jazirah Mandar adalah masyarakat yang sangat ulet dengan perahu sandeq yang sudah sangat dikenal sampai ke mancanegara. Selepas shalat subuh mereka bergegas mendayung perahu untuk pergi melaut. Saat pagi datang, mereka kembali dengan hasil tangkapan yang kemudian dijual dan pada siang hari mereka memperbaiki jaring yang robek atau perahu yang bocor. Pada sore hari jika cuaca baik, pelaut kembali pergi melaut hingga malam hari. Hal ini dilakoni dengan penuh semangat, kedisiplinan dan kesabaran. Namun kenyataannya mereka tetap miskin. Bandingkan dengan seorang pegawai atau pejabat yang malas-malasan yang masuk kantor jam sepuluh pagi dan jam satu siang sudah kembali ke rumah namun mereka tetap kaya.

Dari ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa bentuk kemiskinan lebih bersifat struktural atau buatan, karena sebenarnya secara alamiah Indonesia mempunyai cukup potensi dan sumber daya yang cukup untuk tidak mengalami kemiskinan. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan akibat dari sebuah struktur yang membuat sebagian anggota atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana

ekonomi, sosial, politik dan budaya. Struktur ini menyebabkan tidak adanya pemerataan, tidak berkembangnya kualitas dan daya kreasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta dipinggirkannya peran dan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang terindikasi dengan melemahnya tingkat keswadayaan masyarakat.

Kemiskinan tidak dapat dilihat hanya dari sudut ekonomi semata, seperti kondisi di mana orang tidak memiliki harta benda atau mempunyai pendapatan di bawah batasan nominal tertentu. Pengertian kemiskinan yang sangat ekonomistik dan sempit akan melahirkan bentuk-bentuk kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih merupakan bantuan ekonomi saja. Kebijakan pengentasan kemiskinan dari pemerintah melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau Bantuan Tunai Langsung (BTL) hanya menjadi program penyaluran dana bantuan saja tanpa mencoba memahami kemiskinan yang terjadi dan faktor penyebabnya. Kebijakan itu cenderung semakin memiskinkan rakyat karena menimbulkan ketergantungan ekonomi, tanpa memberikan jalan keluar untuk lepas dari lingkaran kemiskinan.

Pemahaman kemiskinan dalam arti yang lebih luas, atau sering didefinisikan sebagai kemiskinan majemuk, adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan asasi atau esensial sebagai manusia. Kebutuhan asasi meliputi kebutuhan akan subsistensi, afeksi, keamanan, identitas, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang. Kemiskinan subsistensi pada rakyat miskin terjadi karena rendahnya pendapatan, tak terpenuhinya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan serta kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Kemiskinan perlindungan karena meluasnya budaya kekerasan atau tidak memadainya sistem perlindungan atas hak dan kebutuhan dasar rakyat miskin.

Pada sudut lain, kemiskinan terjadi karena adanya bentuk-bentuk penindasan, pola hubungan eksploitatif antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam, kemiskinan pemahaman karena kualitas pendidikan yang rendah, selain faktor kuantitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan, adanya diskriminasi dan peminggiran rakyat dari proses pengambilan keputusan. Beberapa hal yang juga sangat memprihatinkan adalah dipaksakannya nilai-nilai asing terhadap budaya lokal yang mengakibatkan hancurnya nilai sosio kultural yang ada.

Ada hal yang patut untuk disepakati bersama dalam memahami realitas kemiskinan seperti rendahnya kesejahteraan dalam budaya hidup yang serba materialistis dan menjadikan ukuran- ukuran materi sebagai indikator sebuah kemapanan adalah awal manusia merasa miskin dalam hidupnya. Kesejahteraan seyogyanya tidak selalu diukur dengan perolehan-perolehan materi, sebagaimana opini yang selama ini terbangun pada masyarakat. Rendahnya akses pada sumber daya sesungguhnya bukan karena daerah tersebut mengalami ketertinggalan tetapi yang terjadi adalah karena daerah ini salah urus. Sehingga banyak sumber daya potensial yang tidak digunakan atau diolah dengan baik. Budaya suap atau sogok-menyogok mengakibatkan negeri ini menjadi terpuruk karena orang bekerja tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Rendahnya kesadaran kritis dan sikap acuh tak acuh yang dimiliki oleh masyarakat baik karena ketakutan-ketakutan masif ataupun karena keputusasaan menjadikan penguasa menjadi semena-mena dalam membuat kebijakan. Seperti yang dapat kita lihat pada kebijakan pemerintah yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak tepat sasaran. Seorang petani pisang di daerah Kalimbua resah dengan pisang-pisangnya yang membusuk dan sebagian terjual dengan harga murah. Hal ini diakibatkan karena rusaknya jalan sehingga alat transportasi sangat sulit untuk mengangkut pisang tersebut ke pasar. Petani sangat mengharapkan pemerintah dapat memperbaiki akses jalan. Namun yang terjadi adalah keresahan petani tersebut dijawab oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan membagi-bagikan ternak gratis untuk dikembang biakkan. Akibatnya petani beralih profesi menjadi peternak kambing. Karena kurangnya pakan ternak dan pengalaman beternak yang minim, banyak ternak yang mati. Inilah bukti bahwa daerah ini salah urus dan akibatnya rakyat miskinlah yang selalu menjadi korban.

Trust Society menjadi jawaban dari semua ini. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mulai berkurang, ditambah lagi transparansi kebijakan pemerintah yang sangat jauh dari jangkauan masyarakat. Dengan kondisi yang sangat kompleks ini, menyebabkan masyarakat miskin menjadi kebingungan. Mereka bingung tidak tahu harus bagaimana ataupun harus memulai dari mana.

Kemiskinan yang multi kompleks ini terjadi karena tiga hal, yaitu 1) Faktor Kelembagaan, rakyat miskin tidak punya akses ke pembuat kebijakan dan kelembagaan yang ada tidak pernah menjaring atau menyalurkan aspirasi yang muncul dari bawah. Setiap kebutuhan rakyat miskin sudah didefinisikan dari atas oleh kelembagaan yang ada, sehingga kemiskinan tidak akan terselesaikan selama kelembagaan yang ada tidak diperbaiki atau diganti. 2) Faktor regulasi, kebijakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi, melahirkan banyak peraturan yang menguntungkan para penguasa dan pemilik modal. Kebijakan ekonomi dengan menggenjot investasi modal pada sektor-sektor industri yang tidak berbasis pada potensi rakyat kebanyakan menutup kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dan menjadi akar dari proses pemiskinan yang terjadi. 3) Faktor rendahnya transparansi dan Good Governance, tidak adanya transparansi dan keterbukaan pada pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan banyak penyimpangan yang menimbulkan pemiskinan. Kebijakan yang ada hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, dan tidak ada akses bagi masyarakat yang lain. Segala bentuk regulasi diputuskan oleh lembaga-lembaga pembuat kebijakan tanpa mengikutkan para pelaku yang terlibat dan tidak memahami aspirasi rakyat miskin, sehingga kebijakan yang muncul adalah kebijakan yang tidak mendukung rakyat miskin untuk lepas dari kemiskinan.

Program-program penanggulangan kemiskinan hendaknya benar-benar menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat sebab lapisan bawahlah yang paling parah keadaannya. Bertambahnya angka pengangguran dan parahnya kemiskinan dengan sendirinya menurunkan daya beli. Akibatnya terjadi kerawanan sosial yang cenderung terus meningkat. Pemberdayaan masyarakat miskin yang menjadi tanggung jawab semua pihak dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti pengembangan kelembagaan baik dalam bentuk organisasi-organisasi kecil atau dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan masyarakat yang diarahkan pada proses penjaringan aspirasi dan pendidikan alternatif. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil setempat sebaiknya dilakukan untuk mendorong semua pihak agar berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan demikian masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan demokratis dalam pembangunan. Peran pemerintah juga menjadi hal yang sangat penting karena bagaimanapun juga pemerintah adalah penentu kebijakan.

Advokasi kebijakan menjadi hal penting untuk dilakukan karena bukan tidak mungkin program pengentasan kemiskinan justru akan melahirkan kemiskinan-kemiskinan gaya baru yang lebih memprihatinkan. Sinergitas antara masyarakat, pemerintah, LSM dan semua stakeholder pembangunan merupakan kata kunci dalam pemberdayaan masyarakat. Meskipun kemiskinan tidak bisa dihindari, tapi setiap orang apapun status sosialnya punya hak yang sama untuk mengakses dan menikmati hasil pembangunan secara berimbang dan manusiawi.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Koordinator Forum KTI Wilayah Sulawesi Barat
Universitas Asyariah (UNASMAN) Polewali Mandar
Jl. Ahmad Yani No. 36, Polewali Mandar, Sulawesi Barat
Email: **puddin.saifuddin@yahoo.co.id**

Menunggu Kisah Ikan Purba

OLEH **EKO RUSDIYANTO**

Saban sore, apa lagi di akhir pekan pesisir danau Matano selalu saja ramai. Ada rombongan anak muda, ada rombongan keluarga, semua bergembira dan berenang bersama. Di dalam air ikut pula, ikan Opudi dan Luohan melenggok mengikuti gelombang, lembut sekali. Dan pada kedalaman tertentu, ada ikan Butini.

Opudi dan Butini adalah ikan purba endemik yang hidup di danau Matano. Opudi bentuknya lucu, kecil seperti ikan teri, dan memiliki beberapa varian. Ada yang siripnya putih, ada juga yang siripnya kuning. Sementara Butini lebih gelap, punya mulut yang lebar, gigi dan rahang yang kuat. Siripnya juga lebar-lebar.

Pada Oktober 2011, ketika memutuskan untuk tinggal sementara di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pesisir danau Matano, melihat Upudi dan Butini merupakan pengalaman mengesankan. Di kawasan Pontada, tempat akhir pekan pesisir Matano, saya berenang dekat sekali dengan Opudi. Kadang-kadang saya berusaha mengikuti gerakannya. Masuk ke sela-sela tiang balok, berada di bawah papan lompat, lalu meliuk menjauh.

Tapi bagi pengunjung yang tidak bisa berenang, mereka bisa dengan mudah mengamati Opudi dari atas dermaga. Kejernihan air Matano membuat semua makin mudah. Peter E. Hehanusa, ahli Limnologi LIPI, pada tahun 2005 pernah mencatat tingkat kejernihan air di Matano mencapai jarak pandang hingga 25 meter.

Sementara untuk melihat Butini dibutuhkan ketekunan, harus menyelam, karena berada di kedalaman tertentu. Butini senang merayap di dasar danau.

Selain Matano ada empat danau lainnya yang tergabung kompleks danau Malili. Tapi posisi Matano dengan empat danau lainnya lebih tinggi, hingga menjadi hulu aliran, untuk danau Mahalona, Masapi, Wawantoa, Mahalona dan Towuti. Matano memiliki luas 16.408 hektar dan kedalaman hingga 594 meter. Dia menjadi danau kedelapan terdalam di dunia, dan pertama di Asia Tenggara.

Keunikan lain Matano, yang lebih rendah dari permukaan laut, dan gejala alam seperti ini menjadi sangat langka, hanya bisa ditandingi oleh Laut Mati di Lembah Yordan, Yordania.

Warta Limnologi yang diterbitkan LIPI tahun 2009, juga mencatat bila kompleks danau Malili adalah bagian dari danau purba. Terbentuk lebih dari 1 juta tahun yang lalu dan hanya berjumlah 10 buah termasuk Matano, Mahalona dan Towuti.

Ketika saya berenang dan menikmati kehangatan permukaan air Matano, tiba-tiba saya membayangkan bergerak bersama binatang-binatang purba, seperti Dinosaurus. Tapi semua tiba-tiba buyar ketika meihat ikan Louhan yang mengermuni kaki saya saat menuju pesisir dan berdiri tegak.

Louhan-louhan itu, seperti hendak memangsa jari-jari. Dia bahkan berani menukik ke sela-sela jari untuk sekedar menyambut makanan. Louhan itu bahkan ada yang seukuran telapak tangan saya.

Awalnya saya sangat tertarik melihatnya. Lalu dengan bantuan kantong plastik biskuit, saya berhasil menangkap satu ekor. "Iya benar ini Louhan beneran," kata salah seorang kawan yang mulanya merasa tidak yakin.

Louhan bukanlah ikan lokal atau endemik di perut Matano. Louhan adalah ikan luar yang masuk ke perut danau, entah darimana asalnya. Ikan ini mulai ditemukan dalam kumpulan antara tahun 2000 dan 2007. Ikan ini diperkirakan lepas ke danau secara tidak sengaja oleh pemelihara Louhan. Dan sekarang jumlahnya sudah tak dapat lagi dibatasi.

Beberapa catatan menuliskan bila habitat asli Louhan ada di Malaysia dan Thailand. Namun karena keunikan dan kecantikannya, akhirnya ikan ini menyebar kemana-mana untuk menjadi ikan hias di akuarium.

Tapi di Matano, Louhan yang hidup tidak memiliki warna yang memikat, putih dan dan sedikit hitam. Jika saja bagian kepala dan motif sisiknya mempunya ciri khas, maka Louahan ini tak ubahnya seperti biasa. Seorang pencinta olah raga Kayak Sorowako, mengatakan pada saya bila Louhan itu sekarang memenuhi pesisir Matano. Louhan itu beranak pinak disela-sela batuan dengan ratusan penetasan telur setiap musimnya.

Dan sialnya, Louhan itu, malah memangsa telur-telur ikan Opudi dan Butini.

Mendengarnya, saya tiba-tiba menjadi miris. Sekarang apa gunanya, membicarakan bila di Matano bila kelak tak ada Opudi

Ikan purba Butini (*Glossogobius matanensis*), endemik danau Matano

dan Butini. Apakah akan membanggakan Louhan itu? "Cobalah ber-snorkeling di sepanjang pesisir itu, maka yang ada itu Louhan, Louhan, dan Louhan," katanya melanjutkan.

Tidak hanya Louhan, ada pula ikan Nila dan Sapu-sapu. Ikan Nila bahkan tak kalah banyak dengan gerombolan Louhan. Sementara Sapu-sapu sudah menjadi monster. Beberapa pemancing di dermaga penyeberangan, sering kali memancing dan mendapatkan Sapu-sapu hingga seukuran betis orang dewasa.

Saya jadi ingat salah satu artikel VOA Indonesia tentang serbuan ikan luar yang juga sedang mengancam Sungai Missisipi, sebelah tenggara Minnesota, Amerika. Dalam laporan "AS Nyatakan Perang terhadap Ikan Gurami, Peter Sorensen salah seorang peneliti dari Universitas Minnesota menyatakan, bila Gurami-gurami itu sangat kuat makan dan berlomba dengan ikan-ikan setempat. Maka dinyatakanlah perang terhadap sang Gurami Asia.

Mereka juga membawa masalah tersebut ke rapat Kongres agar melakukan upaya penutupan pintu air. Mereka khawatir Gurami itu nantinya akan pindah ke wilayah yang terkenal dengan Sepuluh Ribu Danau dan akan membinasakan ikan lokal. "Ikan-ikan itu adalah suatu ancaman yang memerlukan tindakan cepat dan tepat. Kami mencintai Minnesota dan ingin tetap terkenal sebagai Negara bagian Sepuluh Ribu Danau. Kami tidak ingin dikenal sebagai Negara bagian dengan 50.000 ikan Gurami," papar Senator Klobuchar .

Tapi Amerika dan Indonesia berbeda. Di Indonesia, para peneliti dan perangkat pemerintah hingga anggota legislatif, tak pernah terdengar menyatakan perang. Atau melakukan dan merencanakan strategi untuk melindungi Matano. Padahal tingkat ancaman sudah di depan mata dan telah terjadi.

LIPI dalam Warta Limnologi tahun 2009, bahkan mencatat dari 87 jenis ikan Indonesia yang terancam punah, 66 spesies (75 persen) diantaranya adalah ikan air tawar, dan sebagian besar yang akan punah adalah ikan endemik.

Dan sekali lagi, kita hanya bisa berharap, kelak Opudi dan Butini tidak mengalami nasib seperti Dinosaurus. Punah dan hanya menemukan jejak-jekanya. Atau kelak hanya bisa menyaksikan kisah dan ceritanya, melalui mulut-mulut masyarakat.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Eko Rusdiyanto berprofesi sebagai jurnalis dan dapat dihubungi melalui email pada : **eko.rusdiyanto@yahoo.com**

Tulisan ini juga dapat dibaca pada blog Eko Rusdianto dengan mengikuti link berikut : **http://ekorusdianto.blogspot.com/2012/06/menunggu-kisah-ikan-purba.html**

Tobelo, Tobelo, Tobelo

OLEH **ANDREAS HARSONO**

Tobelo adalah sebuah kota di ujung Pulau Halmahera. Ukurannya kecil bila dibandingkan kota-kota di Pulau Jawa. Ia tak lebih besar dari sebuah real estate ukuran kecil di Jakarta. Ia bisa dijangkau dengan mudah dari Manado langsung dengan pesawat Merpati, mendarat di daerah Kao, sekitar satu jam dari Tobelo. Ada dua bank di Tobelo, BNI dan BRI, serta sebuah pasar dan terminal angkutan kota yang berantakan. Orang banyak jualan makanan di pusat kota, dari coto Makassar hingga ayam goreng Jawa.

Aku mengenal Tobelo ketika membaca buku *Ibu Maluku: The Story of Jeanne van Diejen* karya Ron Heynneman. Van Diejen seorang perempuan Belgia, yang menikah dengan John van Diejen, seorang administratur perkebunan Belanda di Tobelo. Ia naik kapal dari Rotterdam ke Halifax (Kanada) lalu New York, naik kereta api sembilan hari ke San Fransisco, naik kapal lagi, ke Hawaii, lalu Yokohama, lalu Hong Kong, lalu Singapura, lalu Belawan dan Batavia. Ia tinggal di Tobelo antara 1920 dan 1942. Ceritanya sangat memikat, membuat aku jadi ingin melihat tempat-tempat dimana Van Diejen pernah bekerja dan membangun perkebunan kelapa.

Kini Tobelo adalah ibukota Kabupaten Halmahera Utara. Aku tinggal di Tobelo hampir seminggu November ini. Bicara kesana kemari, keliling kota cuma 20 menit, melihat kampus Sekolah Tinggi Theologia Tobelo dan Politeknik Padamara.

Aku juga bertemu dengan praktis semua orang penting di kota ini –kecuali mereka lagi keluar kota. Entah kenapa, aku suka dengan kota ini, mungkin karena pengaruh pasangan Alexander Davey dan Grace Siregar. Mereka bekerja di Tobelo dan menyewa rumah kayu Minahasa. Aduh enaknya, angin malam menerpa teras rumah. Alex bekerja untuk World Vision Indonesia. Grace seorang seniman, banyak membina hubungan dengan seniman Ternate, Tobelo dan Morotai.

Teluk Kao, dimana Tobelo terletak, pada zaman Perang Dunia II jadi pangkalan armada laut Jepang. Lautnya dalam. Pada zaman perang, ada lebih dari 2,000 kapal perang hilir mudik disini. Sebagian besar ditenggelamkan oleh pesawat terbang Amerika. Ada beberapa haluan kapal masih terlihat di Teluk Kao. Jepang juga membangun lapangan terbang besar dengan tujuh landasan.

Di Tobelo ada beberapa hotel. Aku tinggal di Villahermosa, yang terletak di daerah Wosia. Kamar bersih. Udara bersih. Harga Rp 100,000 per malam. Mereka juga sedia laundry. Pemiliknya, orang Tionghoa Tobelo, Heri Manonata, sangat membantu bila aku mau ketemu orang, naik gunung, snorkelling, naik gunung, cari mobil dan sebagainya.

Aku kira, Tobelo bisa jadi daerah tujuan wisata sing ciamik! Ada laut. Ada gunung. Ada sejarah.

Pusat kota sederhana. Tobelo termasuk kota yang banyak penduduk Kristennya. Aku melihat orang memakai kalung salib dimana-mana. Di pusat kota, juga sering terdengar lagu-lagu disco gereja. Amazing Grace dan Kumbaya rasanya menghantam telinga di pusat kota ini. Pada 1999-2001, Tobelo juga jadi pusat pertumpahan darah Kristen-Islam yang buruk sekali. Hampir separuh kota terbakar habis. Listrik tak menyala hampir empat tahun.

Menariknya, ia cepat sekali bangkit dari keterpurukan itu. Ada suasana terbuka yang wajar. Baik orang Kristen dan Islam mengatakan tak ada yang menang, tak ada yang kalah dalam peperangan itu. Mereka kini belajar untuk toleran satu dengan yang lain.

Ani Sawal, orang Ternate, menjual nasi kuning khas Ternate di pusat kota. Aku suka sekali nasi ini. Ia dicampur bakmi, ikan cakalang masak bumbu dan acar mentimun. Setiap pagi aku sarapan disini.

Hari ketiga, "Cik Ani" cerita pengalamannya saat kerusuhan. Rumah dan restorannya habis terbakar. Suaminya, orang Bugis, Tellong Haji Lombe, meninggal karena stres di Makassar. Anaknya, yang ikut berperang, kena bom dan kaki kanannya cacat. Ia menangis ketika cerita. Cik adalah bahasa Tobelo untuk Ibu atau Madame.

Pada 1980, Cik Ani buka rumah makan "Maro Ona" yang artinya "Sama Saja" dalam bahasa Galela. Dia jual nasi kuning, ikan bakar. Suaminya tukang jahit serta punya 36 becak. Pada Desember 2000, perang di Maluku menjalan ke Tobelo. Muslim lawan Kristen. Ceritanya seram.

Di pasar Tobelo, aku juga terpesona, sekaligus jijik, melihat orang menjual kelelawar. Paniki --masakan kelelawar-- tergolong kegemaran orang Tobelo. Namun cara membunuh kelelawar ini yang bikin aku jijik. Kelelawar hidup-hidup ini diambil dari

keranjang dan dipukul kepalanya dengan kayu. Darah muncrat.

Aku juga belanja perhiasan besi putih asal Pulau Morotai. Kerajinan ini terkenal sekali. Besi putih diambil dari bekas-bekas pesawat terbang Sekutu yang dulu ditinggalkan di Morotai sesudah Perang Dunia II.

Pisang montok-montok. Kebanyakan sayuran dan buah-buahan datang dari daerah Galela, utara Tobelo, yang mayoritas penduduknya Muslim. Baik Tobelo dan Galela sebenarnya daerah campuran. Kampung Islam dan kampung Kristen berserakan dan berselang-seling.

Bila bisa naik mobil ke Duma, sebuah daerah yang indah di ujung Danau Galela, kita juga bisa berkunjung ke Gereja Masehi Injili di Halmahera cabang Duma. Namanya, GMIH Nita. Disini ada kuburan massal orang GMIH yang 201 orang mati dibunuh dalam suatu serangan dari Pasukan Jihad pada 19 Juni 2000. Mereka belakangan dimakamkan bersama-sama. Banyak pendatang berkunjung.

Di samping pemakaman ini ada replika KM Cahaya Bahari yang tenggelam seminggu sesudah serang Duma. Ada 100 warga Duma yang hendak mengungsi ke Manado ikut tenggelam. Ini adalah jumlah korban terbesar dalam pertikaian agama di daerah Maluku. Duma kehilangan lebih dari 300 warganya dalam pertikaian ini. Kini kebanyakan warga desa adalah janda dan anak-anak.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Dari blog Andreas Harsono, tulisan ini dibuat pada 23 November 2005. Anda juga dapat membaca tulisan ini pada link berikut
http://www.andreasharsono.net/2005/11/tobelo-tobelo-tobelo.html

Leiden University Scholarships

For excellent Non-EU/EEA students enrolling in a Leiden University master's degree programme and for excellent students from all nationalities enrolling in a Master of Law Advanced Programme or MSc in International Relations and Diplomacy.

For whom?
Non-EU/EEA students enrolling in a Leiden University master's degree programme starting September 2012 or February 2013 (All MA, MSc and LL.M programmes as mentioned on the website Master's programmes in Leiden).
All nationalities enrolling in the following programmes starting September 2012 or February 2013:
Master of Laws: Advanced Studies in Air and Space Law
Master of Laws: Advanced Studies in European and International Business Law
Master of Laws: Advanced Studies in International Tax Law
Master of Laws: Advanced Studies in Public International Law
MSc in International Relations and Diplomacy

Additional requirements:
In his or her prior academic education abroad, the applicant must have achieved excellent study results which are relevant for the programme for which the student wishes to enroll. As an indication, the student will be among the top 10% for the relevant programme followed abroad.
The applicant will hold a non-EU/EEA passport and will not be eligible for support under the Dutch system of study grants and loans.
Scholarships will not be awarded to applicants who have already obtained a Leiden University master's degree.
Students who are granted a Leiden Excellence Scholarship must comply with and confirm in writing their agreement with the terms and conditions attached to the scholarship prior to the granting of the scholarship.

Scholarship Amount:
The Leiden University Excellence Scholarship programme has 5 awards:
Platinum: Covers the tuition fee minus the home fee* and an allowance of €10,000 for living costs
Gold: Covers the tuition fee minus the home fee*
Silver: Covers 75% of the tuition fee
Bronze: Covers 50% of the tuition fee
Ivory: Covers 25 % of the tuition fee

Application procedure for September 2012 / February 2013 intake
Fill in your online application for admission to Leiden University
Upload all necessary documents
Indicate clearly that you would like to apply for the LExS scholarship on the scholarship page
Upload your letter of motivation for the LExS scholarship on the scholarship page
Submit your online application
Pay the application fee

Deadline
Deadline 1 October 2012 for programmes starting in February 2013.
All LExS applicants will be informed by the scholarship department of Student Educational Affairs.
Mid November 2012 for the February 2013 intake.

Selection process
The Faculty selection committee will review the applications. Students are selected on the basis of academic merit.

For more information, please visit official website: **www.leidenuniv.nl**

WEBSITE BULAN INI

REMOTIVI

http://remotivi.or.id

Bagi kebanyakan orang, telah menjadi kebiasaan untuk menonton TV dan menikmati acara yang disajikan setiap hari. Berita, hiburan, gosip, dan film dinikmati oleh setiap keluarga. Belakangan, semakin banyak orang yang mulai merasa tidak nyaman ketika tayangan-tayangan yang ada di TV sering tidak sesuai dan membawa pengaruh buruk.

REMOTIVI adalah sebuah inisiatif warga untuk memantau tayangan televisi di Indonesia. REMOTIVI melaksanakan pendidikan melek media dan advokasi yang bertujuan untuk mengembangkan tingkat pemahaman masyarakat tentang media, serta menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap berbagai siaran televisi. REMOTIVI juga mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.

Website juga menekankan bahwa urusan televisi bukan sekedar urusan bisnis, namun lebih kepada faktor yang membentuk karakter masyarakat, karakter bangsa. Hal ini yang luput dari peran negara sehingga urusan masyarakat dalam mengonsumsi tayangan televisi, tidak cukup seksi untuk diperhatikan. Nama REMOTIVI dipilih untuk menunjukkan bahwa kendali (remote) ada di tangan penonton. Menyaksikan tayangan sehat atau menjadi penonton cerdas adalah pilihan.

Bila tidak puas dan sering melihat keganjilan serta keanehan yang ada di TV sekarang, Anda dapat bergabung dengan grup diskusi pada website ini. Dengan demikian Anda pun bisa mendorong acara-acara TV yang mencerdaskan dan mendidik bangsa.

Pusat Sumber Daya Buruh Migran

http://buruhmigran.or.id

Pekerja yang bekerja di luar negeri pun membutuhkan akses informasi. Terutama Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki pengetahuan yang pas-pasan mengenai negara dimana mereka akan bekerja. Tak jarang dari keterbatasan tersebut sering terjadi kejadian-kejadian yang tidak mengenakan bahkan sampai bersentuhan dengan ranah hukum.

Pusat Sumber Daya Buruh Migran (Migrant Worker Resource Centre) merupakan layanan atau dukungan untuk pengarusutamaan isu buruh migran melalui pengelolaan informasi dan pengetahuan. Lewat dukungan ini, para pegiat buruh migran saling berkomunikasi dan bertukar informasi dengan sesama buruh migran, keluarga, perkumpulan buruh migran, organisasi nonpemerintah (ornop), dan lembaga-lembaga pemerintah.

Hal tersebut dijawab dengan membuat aplikasi berbasis web, untuk bertukar informasi, ruang berdiskusi, dan pengembangan ekonomi. Dukungan ini memungkinkan jaringan kerja buruh migran mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang berpihak pada buruh migran, membangun solidaritas antardaerah, dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.

WAJAH KTI

Pasar Sosial di Tambaruni, Fak Fak

Kalah gengsi dan pamor. Mungkin ini gambaran yang pas tentang keberadaan pasar tradisional di beberapa kota besar dan daerah yang sudah maju. Namun kesan seperti itu tidak dijumpai Pasar Tambaruni di Fak Fak. Pasar tradisional ini masih menjadi denyut nadi masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian.

Bukan hanya sebagai pertemuan pembeli dan penjual saja, pasar juga menjadi ajang bersosialisasi dan memelihara kekerabatan. Pedagang satu dengan yang lainnya memang saling bersaing, namun nilai kawan dan persaudaraan tetap dijunjung ditinggi. Ada bentuk ikatan sosial yang erat karena merasa senasib mengais rejeki dan berjualan setiap hari. Ada saling mendukung dan menghormati serta toleransi dalam hubungan tersebut.

Lihatlah mama-mama, bapa-bapa, pemuda, pemudi dan anak-anak menjadi satu serta bercampur baur disana. Pasar ini tidak hanya mengutamakan proses jual-beli namun juga memelihara kepercayaan dan kejujuran. Di sudut sana, terdengar protes kecil dari mama penjual ikan ketika 'tetangga' sebelah lebih ramai jualannya. Penjual lain hanya tersenyum dan terus tenggelam dalam kegiatannya masing-masing.

Foto : Stevent Febriandy

Disinilah kepercayaan dan kepedulian timbul dimana nilai-nilai kemanusiaan ditempatkan lebih tinggi dari nilai-nilai ekonomi dan konsumsi.

CERITAKAN KTI LEWAT BIDIKAN ANDA

BaKTINews menyediakan ruang bagi anda yang ingin menceritakanKTI lewat foto.

Kirimkan foto-foto anda dengan ukuran dan resolusi yang baik disertai keterangan singkat ke alamat kami :
info@bakti.org

PROFIL LSM

YKSSI

Yayasan Keluarga Sehat Sejahtera Indonesia

Yayasan keluarga Sehat Sejahtera Indonesia (YKSSI) adalah sebuah lembaga swadaya yang didirikan pada tahun 1989 yang didasarkan pada keprihatinan terhadap derajat kesehatan masyarakat Nusa Tenggara khususnya Lombok. Derajat kesehatan masyarakat yang rendah ini antara lain disebabkan oleh tingginya angka kematian Ibu dan bayi juga oleh adanya sikap dan perilaku sekelompok masyarakat NTB yang masih mempercayai mitos-mitos yang telah lama ada dalam masyarakat. YKSSI hadir di tengah masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program-program mereka.

Visi

Tercapainya masyarakat (perempuan dan anak) yang sehat dan sejahtera serta berkeadilan jender.

Misi

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak serta keluarga.
2. Merubah paradigma masyarakat yang merugikan kelangsungan hidup perempuan dan anak
3. Miningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menunda perkawinan, menjarangkan kelahiran dan mempunyai anak 2 lebih baik
4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Kesehatan Reproduksi
5. Meningkatkan pendidikan anak, perempuan serta keluarga.
6. Membantu memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat
7. Meningkatkan keperdulian masyarakat terhadap perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi

Tujuan

- Memperbaiki mutu kesehatan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dengan memintarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan itu sendiri.
- Meningkatkan kesejahteraan ibu dan keluarganya, melalui pendidikan dan perekonomian.
- Menurunkan angka kelahiran
- Menurunkan angka kematian ibu dan anak.
- Memaksimalkan peranan Posyandu.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai masalah sosial, antara lain masalah-masalah kesehatan terutama untuk kesehatan reproduksi, kependudukan, lingkungan hidup, gizi, perumahan sehat dan pentingnya pendidikan melalui media KIE.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan perubahan iklim dan mengetahui bagaimana cara menanggulangi bencana (Disaster Management)

Sejak dirikan YKSSI telah melakukan berbagai macam kegiatan untuk dalam rangka memenuhi misi mereka, beberapa kegiatan itu antara lain :

1. **Program Sosialisasi Anemia**
   Sosialisasi dilakukan melalui pembuatan dan pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Edukasi (KIE) cetak maupun non cetak untuk kesehatan ibu dan anak, melakukan survei – survei kesehatan bersama Path (Program for Appropriate Technology in Health), Dinas Kesehatan Provinsi dan beberapa lembaga internasional lainnya.

2. **Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Pendidikan Kesehatan Dasar berperspektif Jender dan Program Penanggulangan Kawin Cerai bagi remaja dan anak.**

3. **Penguatan Ekonomi Perempuan Berperspektif Jender**
   Kegiatan ini dilakukan melalui p endampingan kelompok usaha produktif, lokakarya dan pemberian bantuan modal usaha.
   Bekerjasama dengan FES (Frederich Ebert Stiftung) Jerman

4. **Penanggulangan kawin cerai.**
   Lombok adalah salah kota dengan angka kawin cerai tertinggi di dunia. Tingginya angka ini juga mempengaruhi derajat kesehatan ibu dan anak-anak di Lombok. Untuk menurunkan angka kawin cerai ini, YKSSI bersama masyarakat membuat awiq-awiq (peraturan) tingkat dusun di 109 dusun di Lombok tentang kawin cerai.

5. **Perbaikan Kesehatan Masyarakat (Perempuan) Kawasan Hutan Yang Terintegrasi Dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam kerjasama dengan WN.**
   Melakukan diskusi berkala tentang KIA, Penyakit dan Kesling, Kunjungan rumah prioritas, Pencatatan data dusun, menumbuhkan kesadaran menabung (dana sehat dan pendidikan), Pertemuan berkala kader, dukun, bidan dan fasilitator desa, Pelatihan Tanaman obat, diskusi berkala laki dan perempuan, evaluasi untuk melihat hubungan relasi laki dan perempuan, fasilitasi dengan instansi terkait berdasarkan kebutuhan masyarakat.

6. **Advokasi Anggaran Kesehatan pro rakyat Miskin di Lombok barat**
   Gerakan advokasi anggaran dengan Kolaborasi dengan Fatayat NU, dan PKBI NTB, dukungan dana dari TAF (The Asia Foundation) September 2005 – September 2006

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk bekerja sama dan informasi lebiha lanjut silahkan menghubungi :
Yayasan Keluarga Sehat Sejahtera
Jl. Guru Bangkol No. 17 Kr. Anyar Pagesangan Mataram 83237
Lombok – Nusa Tenggara Barat
Telp : 0370 - 634576
Dra. Latifa Bay Westhoff (*Direktur*)
Latifa.bay@gmail.com

4 Juni 2012

News Cafe: Pro-kontra Pendidikan Gratis

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Sulawesi Selatan mengalami perkembangan sosial ekonomi yang pesat. Terjadi peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi meningkat, perbaikan penanaman modal, penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka pengangguran, dalam kondisi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Namun demikian Sulawesi Selatan memiliki banyak tantang antara lain masalah dibidang pendidikan. Hal ini terungkap dalam acara News Cafe yang berlangsung di backyard BaKTI 4 Juni 2012 lalu yang mengangkat topik pro-kontra pendidikan gratis di Sulawesi Selatan.

"Program pendidikan gratis telah mengakomodasi kepentingan masyarakat akan pendidikan. Akan tetapi program ini masih membutuhkan akselerasi,khususnya untuk menjangkau anak usia sekolah yang tidak bersekolah agar dapat bersekolah" demikian dikatakan Dr. Agussalim, peneliti dari P3KM Universitas Hasanuddin yang hadir sebagai narasumber.

Dari hasil diskusi yang dikemas secara santai dan hangat ini terungkap juga bahwa ternyata program ini masih harus terus didorong untuk dapat berkontribusi terhadap peningkatan posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel. IPM Sulsel masih jauh dibawah angka rata-rata nasional. Sulsel baru menduduki posisi 19 ditingkat nasional. Masih jauh dari target yang dicanangkan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yaitu berada di peringkat sepuluh pada tahun 2013. Peserta yang hadir dalam acara ini berasal dari kalangan pemerintah daerah, akdemisi, media dan NGO.

20 Juni 2012

Diskusi: Mendorong Pembentukan Forum Multi Pihak Pengurangan Resiko Bencana

Bertempat di ruang pertemuan BaKTI Makassar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan dan *Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction* (AIFDR) mengadakan sebuah diskusi yang mengangkat tema "Mendorong Pembentukan Forum Multipihak Pengurangan Resiko Bencana". Diskusi pertama ini adalah rangkaian seri diskusi yang akan dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama parapihak sebelum pembentukan Forum Multi-pihak untuk upaya Penanggulangan Resiko Bencana (PRB) di Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman parapihak tentang pentingnya Forum/Plat Form Daerah dan perumusan isu dan peran-peran strategis Forum PRB untuk mendukung upaya PRB di Sulawesi Selatan ke depan. Hadir sebanyak 30 peserta yang berasal dari kalangan pemerintah daerah, LSM/CSO, INGO, dan media.

BaKTI menyediakan fasilitas Ruang Pertemuan bagi para pelaku pembangunan untuk melaksanakan seminar, lokakarya, rapat, dan diskusi. Reservasi ruangan dapat dilakukan melalui email dengan menghubungi info@bakti.org atau telepon 0411 3650320-22, atau berkunjung langsung ke Kantor BaKTI, Jl. Dr. Sutomo 26 Makassar.

INFO BUKU

Indeks Masyarakat Sipil, Peran Masyarakat Sipil untuk Mewujudkan Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis

Penulis | Author
Fransisca Fitri, Lili Hasanuddin, Nor Hiqmah dan Sri Indiyastutik

Penerbit | Publisher
Yappika

Deskripsi fisik | Physical Description
: xxvi + 300 hal, 16 x 26 cm

Pembangunan masyarakat sipil membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun perubahan peran masyarakat sipil perlu terus diperjuangkan untuk terwujudnya demokrasi yang lebih baik. Indeks masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk menjadi salah satu dasar mengukur dan menimbang kekuatan dan kesehatan masyarakat sipil. Indeks ini pula dapat dijadikan sebagai benchmark yang kuat bagi pemerintah sebagai referensi mendorong keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam konsolidasi demokrasi Indonesia.

Inspirasi dari Komunitas

Penulis | Author
Melky Koli Baran

Deskripsi fisik | Physical Description
vii+ 91 Hal, 21 x 15 cm

ISBN
978-979-98848-5-5

Cerita –cerita menarik yang terjadi di lapangan program Building Resilience seputar resiko bencana berbasis masyarakat tertuang dalam buku ini. Kumpulan cerita yang berisi pengalaman masyarakat ditulis secara sederhana namun menjadi bukti bahwa inspirasi masyarakat tak pernah habis untuk digali dan dipelajari.

Paradoks Papua

Penulis | Author
Cypri J. P. Dale dan John Djonga

Deskripsi fisik | Physical Description
xxvii+17 hal, 16,5 x 23 cm

ISBN
979-979-061-209-9

Kunci pemetaan inti persoalan yang seharusnya diselesaikan dalam transformasi konflik papua menjadi salah satu isi dari literature ini. Buku ini juga menyajikan tinjauan kritis atas kebijakan terkini pemerintah pusat di papua yaitu percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Melalui buku ini pembaca diatar untuk melihat dari dekat sebagian akar persoalan yang menjadi sumber konflik di Papua.

Laporan Pembangunan Dunia 2011; Konflik, Keamanan dan Pembangunan

Penerbit | Publisher
The World Bank dan Salemba Empat

Deskripsi fisik | Physical Description
xxiv+430 hal, 21 x 28 cm

ISBN
979-979-18706-3-4

WDR 2011 menyajikan pengalaman-pengalaman Negara yang berhasil melewati transisi kekerasan berulang menuju kebutuhan khusus untuk memprioritaskan tindakan-tindakan yang membangun kepercayaan antara Negara dengan warga Negara, serta mengembangkan lembaga yang dapat memberikan keamanan, keadilan dan pekerjaan.

BaKTI mengucapkan terimakasih kepada YAPPIKA, Oxfam, The World Bank dan Bapak John Boekorsjom atas sumbangan buku untuk Perpustakaan BaKTI.

Buku-buku tersebut diatas tersedia di Perpustakaan BaKTI.
Perpustakaan BaKTI berada di Kantor BaKTI Jl. Dr. Sutomo No. 26 Makassar.
Fasilitas ini terbuka untuk umum setiap hari kerja mulai dari jam 08:00 – 17:00.